



**FAKTOR PENYEBAB KERUSUHAN ANTI ETNIS CINA
BULAN MEI 1998**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Hubungan Internasional
Jurusan Hubungan Internasional
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asli	Madan	Klass
Terima	Pembelian	305.8089951
Intek		SUN
Pengantar		f e,

Oleh : KONFLIK RASIAL - ETNIS CINA

EVI KRISTANTI SUNARKO

NIM. 980910101137

Dosen Pembimbing :

Dr.A. EBY HARA, MA

NIP. 131833004

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
2003**

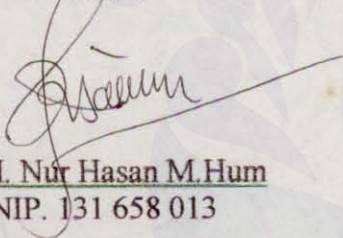
PENGESAHAN

Telah diterima dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Sripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada
Hari : Rabu
Tanggal : 30 Juli 2003
Jam : 09.00

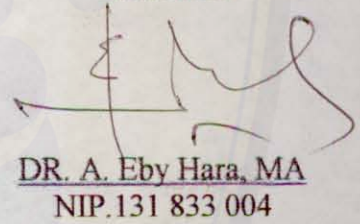
Panitia Penguji

Ketua



Drs. M. Nur Hasan M.Hum
NIP. 131 658 013

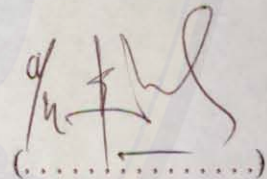
Sekretaris



DR. A. Eby Hara, MA
NIP.131 833 004

Anggota Penguji

1. Drs. Bagus Sigit


(.....)

Mengetahui :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

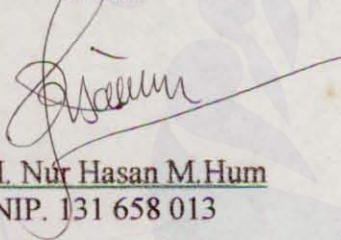
PENGESAHAN

Telah diterima dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Sripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada
Hari : Rabu
Tanggal : 30 Juli 2003
Jam : 09.00

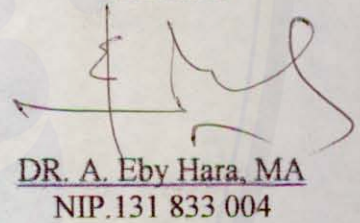
Panitia Penguji

Ketua



Drs. M. Nur Hasan M. Hum
NIP. 131 658 013

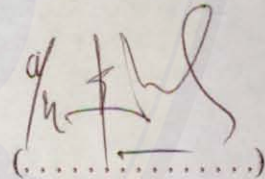
Sekretaris



DR. A. Eby Hara, MA
NIP. 131 833 004

Anggota Penguji

1. Drs. Bagus Sigit



(.....)

Mengetahui :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Kristanti Sunarko
NIM : 980910101137
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Institusi : Universitas Jember

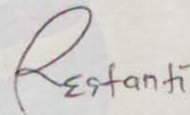
Sebagai penulis menyatakan bahwa : **“Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri”**.

Dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam penulisan ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui.

Demikian pernyataan saya tersebut yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, Juli 2003

Penulis



Evi Kristanti Sunarko

MOTTO

..... Tidaklah Allah membebani kepada seseorangpun kecuali berdasar kemampuannya. Baginya apa yang diusahakan dan atasnya akibat yang dikerjakannya (Al Baqoroh 285)

Orang-orang yang benar-benar besar di atas segalanya adalah sopan, bijaksana dan murah hati. Bukan hanya pada orang tertentu pada situasi tertentu, tapi pada semua orang disegala waktu (Thomas J. Watson, Jr)

Jangan menunda sampai besok apa yang bias dikerjakan hari ini, karena jika anda senang mengerjakannya hari ini, anda akan bias mengulanginya lagi esok hari (James A. Michener)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk

- ☺ Ayahku Drs. Hary Sunarko dan Ibunda Tatik S. untuk semua kesabaran, dukungan dan perjuangannya dalam membimbing dan mendewasakan anak-anaknya. Serta my beauty sis. Ana and my handsome bro Hendra, yang selalu mengalah dalam setiap hal.
- ☺ Sahabat-sahabat terbaik yang menemaniku berjalan didunia (tanpa kalian hari-hariku sepi)
- ☺ Almamater dan Nusa Bangsa yang tercinta INDONESIA

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang tepat selain puji syukur kehadirat Allah SWT, Dzat Mulia Yang Maha Agung. Berkat rahmat, taufiq dan ridlo-Nyalah karya tulis ini dapat terselesaikan.

Sebagai sebuah hasil karya seorang anak manusia yang masih berjalan dewasa, karya tulis ini mengalami banyak kekurangan disana-sini. Namun penulis berharap karya “ Faktor Penyebab Kerusuhan Anti Etnis Cina Bulan Mei 1998” mampu menjadi sebuah wacana, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang membacanya. Bahwasanya prasangka terhadap etnis Cina hanyalah diatas realita saja. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita juga mempunyai teman yang beretnis Cina.

Penulis sadar bahwa karya ini tidak akan dapat tanpa keterlibatan pihak-pihak yang memberi dorongan semangat, motivasi, kritik membangun maupun suntikan dana. Yang kesemuanya merupakan bantuan yang tidak terkira berartinya bagi penulis. Tidak ada kata yang dapat mewakili selain ucapan terima kasih serta penuh hormat yang penulis sampaikan pada:

1. Dr. A. Eby Hara, MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. H.M. Toerki sebagai dosen FISIP UNEJ
3. Drs. Nurudin selaku ketua jurusan HI UNEJ
4. Drs. Himawan Bayu P., MA selaku dosen wali

5. Pengelola perpustakaan UNEJ dan CSIS
6. Sahabat-sahabat terbaik yang menemani penulis hingga akhir masa studi dan selalu memberi makna persaudaraan dan cinta kasih yang indah
7. Teman-temanku Debby, Icha, Irma, Nila, Rani, Yani dan semua teman-teman keluarga besar HI 1998. Semoga sukses dan lancar dalam menyelesaikan skripsi. Never Give Up!!
8. Adik-adikku Tika, Ratna dan Yanti, crew villa “Hijau” Bangka Raya 26. Thx untuk kebersamaan dan okehannya.
9. Teman-temanku: Agoes, Om, Iksan dan gank gilanya, terima kasih atas bantuan kalian.
10. Saudara-saudara dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terima kasih yang tulus yang dapat penulis sampaikan dan semoga amal kebaikan kalian yang diberikan mendapat balasan yang pantas dari Allah SWT.

Penulis sadar bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik dari pembaca akan sangat membantu bagi peningkatan kualitas karya tulis ini dimasa mendatang.

Jember, Juli 2003

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.2.1 Batasan materi	5
1.2.2 Batasan waktu.....	5
1.3 Problematika.....	5
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	6
1.5 Hipotesa.....	13
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Metode pengumpulan data.....	15

1.6.2 metode analisis	16
1.7 Pendekatan.....	17
BAB II PERKEMBANGAN ETNIS CINA DI INDONESIA	
A. Keberadaan Etnis Cina di Indonesia	19
1. Etnis Cina dan Kewarganegaraan	22
2. Perkembangan Ekonomi Etnis Cina	26
3. Dominasi Etnis Cina di Bidang Ekonomi.....	29
B. Kebijakan Integrasi Nasional Pemerintah Indonesia	34
1. Kebijakan Integrasi Nasional Soeharto Terhadap Etnis Cina	36
BAB III BERKEMBANGNYA POTENSI KONFLIK ANTI ETNIS CINA	
A. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Terhadap Etnis Cina	43
B. Implikasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan	50
1. Kesenjangan Ekonomi Antara Etnis Cina Dengan Pribumi	50
2. Eksklusivisme Etnis Cina	53
3. Perlindungan Pemerintah Terhadap Konglomerat Cina	54
BAB IV PEMICU KERUSUHAN MEI 1998 DI JAKARTA	
A. Krisis Moneter Terburuk Selama Masa Pemerintahan Soeharto.....	62
B. Situasi Politik Dampak Dari Krisisi Ekonomi.....	73
C. Konflik dan Permasalahannya	80
1. Konflik dan Kekerasan.....	83

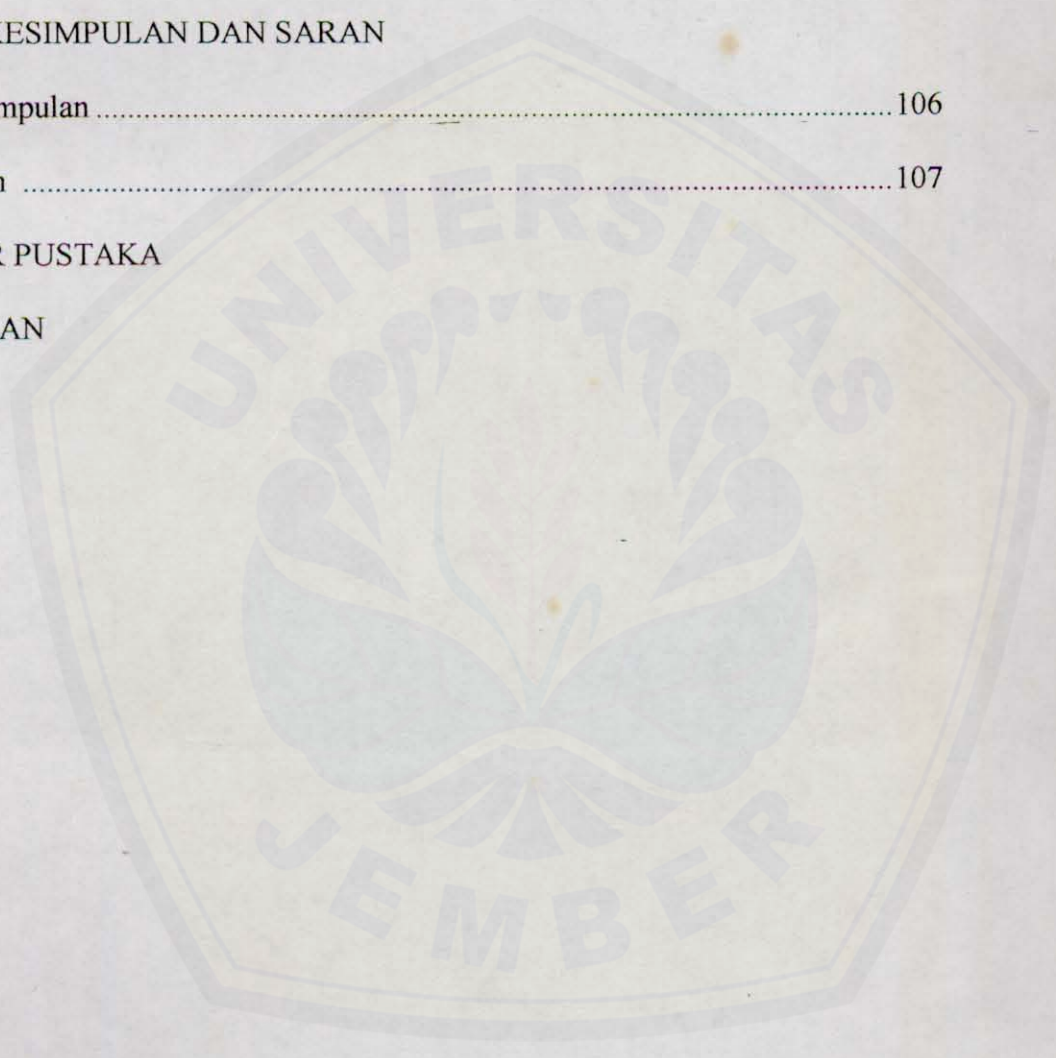
2. Pelaku Konflik dan Kerusuhan	85
3. Faktor – Faktor Yang Mendorong Konflik	91
4. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Konflik	95
D. Kerusuhan Mei 1998.....	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pembayaran Pajak Pendapatan Tahun 1925	28
Tabel 2 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Tahun 1980-1996	56
Tabel 3 Investasi Swasta Dan Negara Di Indonesia Tahun 1967-1980.....	62
Tabel 4 Kelompok – Kelompok Bisnis Pribumi Dan Non Pribumi Menurut Aset	62
Tabel 5 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1990-1998.....	66
Tabel 6 Kronologis Kebijakan Ekonomi Pemerintah Juli-Oktober 1997.....	68
Tabel 7 Kronologis Peristiwa 1998, 12 Mei	107
Tabel 8 Kronologis Peristiwa 1998, 13 Mei	108
Tabel 9 Kronologis Peristiwa 1998, 14 Mei	110

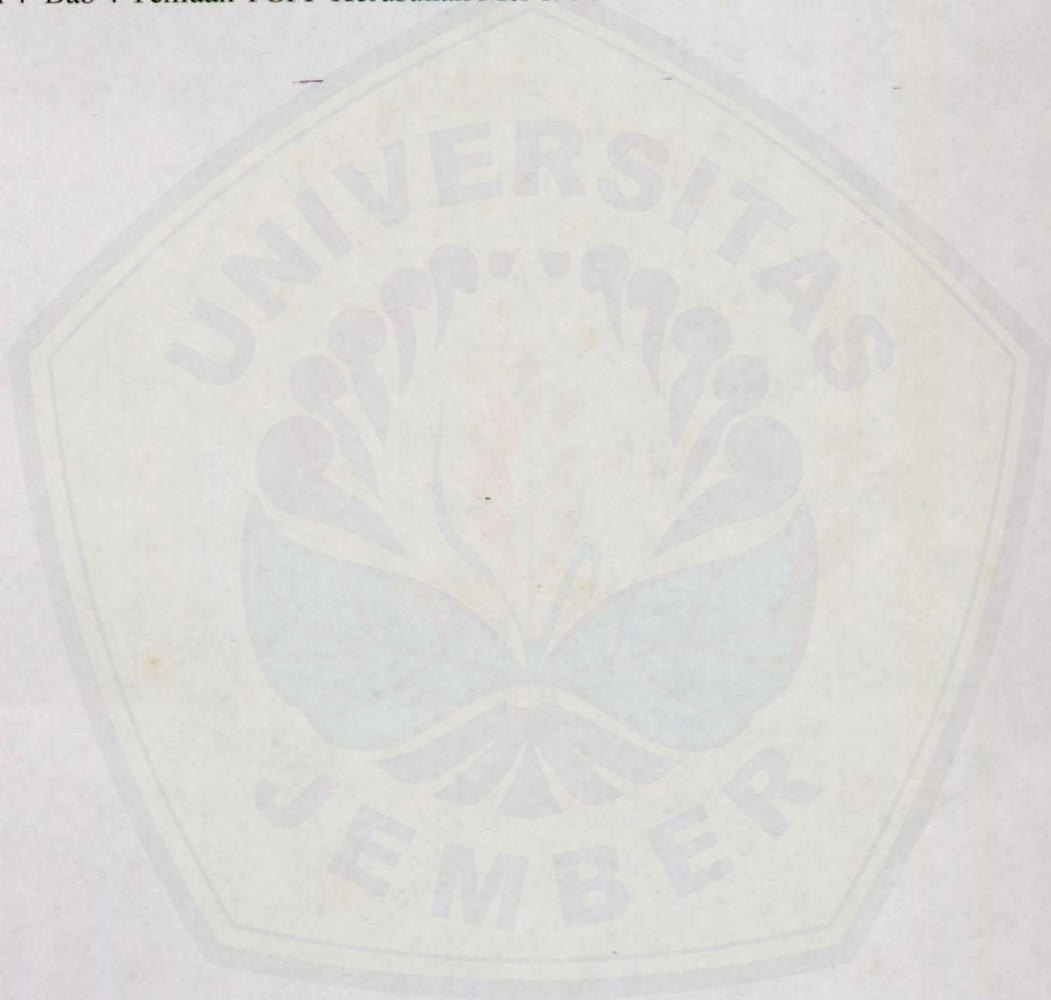
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jumlah Tionghoa di 11 Propinsi Tahun 2000

Lampiran 2 12 Besar Konglomerat Indonesia Versi PDBI (miliar rupiah)

Lampiran 3 Daftar Peraturan Yang Dianggap Diskriminatif

Lampiran 4 Bab 4 Temuan TGPF Kerusuhan Mei 1998





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pancasila sebagai dasar negara secara teoritis menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap kelompok baik suku maupun agama. Setiap suku ataupun agama yang ada di Indonesia dapat hidup secara berdampingan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konteks ini kiranya hanya merupakan suatu slogan saja, karena banyak kita jumpai adanya perbedaan pandangan, ataupun kepentingan antar setiap kelompok maupun suku dan bahkan agama, sehingga menimbulkan berbagai macam konflik. Konflik demi konflik terus berkelanjutan, bahkan tiada henti dan terus merambat kesebagian besar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Konflik yang dipicu oleh RAS ataupun rasial, agama dan suku sudah cukup lama terjadi bahkan sejak masa pemerintahan Belanda. Politik *divide et impera* kolonial Belanda dan sistem pengkotak-kotakkan warga negara berdasarkan etnis, suku, agama, keturunan dan lain sebagainya menimbulkan berbagai prasangka, dan rasa saling curiga yang kemudian termanifestasi secara ekstrim dalam konflik.

Etnis Cina pada masa pemerintahan Belanda dipandang lebih baik dan bahkan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau terhormat jika dibanding dengan penduduk asli pribumi yang mayoritas, hal ini menimbulkan adanya kebencian yang cukup mendalam terhadap keberadaan etnis Cina atau golongan minoritas. Sedangkan

pada pemerintahan Sukarno, golongan ini dipandang sebagai pendukung Gerakan G30S PKI, hal ini didasarkan pada :

Pertama harian Warta Bhakti yang dahulunya dikenal dengan *Sin Po* dalam tajuk rencananya memberikan dukungan kepada Untung. **Kedua** Bendera kedutaan besar Tiongkok di Jakarta tidak mengibarkan bendera setengah tiang untuk berduka cita atas meninggalnya para jendral yang terbunuh. **Ketiga** adanya dukungan yang nyata dan provokasi dari radio Peking terhadap terjadinya revolusi di Indonesia.. **Keempat** dilaporkan oleh pers Indonesia telah diketemukannya granat tangan dan senapan buatan Tiongkok yang diselundupkan. Puncak dari kebencian terhadap etnis Cina ini adalah dengan ditutupnya sekolah-sekolah yang melayani kebutuhan orang-orang Cina dan diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini pejabat militer setempat.¹

Pada masa pemerintahan Suharto keberadaan etnis Cina semakin berjaya, dan bahkan menguasai hampir 80 % sektor perdagangan dan perekonomian di Indonesia, sedangkan golongan pribumi hanya menguasai kurang lebih 20% sektor perekonomian dan perdagangan.² Golongan minoritas atau non pri yang notabene hanya berjumlah 4% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 200 juta jiwa³ mendominasi sektor komersial dan menguasai 80% dari 163 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta⁴

¹ Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal.114

² *ibid*, hal. 85

³ Moh. Sa'dun M. ed, *Pri Dan Nonpri: Mencari Format Baru Pembauran*, CIDES, Jakarta, 1999, hal. 64

⁴ *The Sunday Times* 17 Mei 1998

Terjadinya kerusuhan, entah disulut dengan sengaja atau tidak seperti peristiwa Mei 1998, membuat orang-orang keturunan Cina lain yang tidak bersalah, yang tidak semuanya kaya, yang hidup sederhana dan bekerja keras mencari nafkah menjadi sasaran empuk karena lemah, tidak dapat / tidak berani melawan dan umumnya tidak dapat mengharapkan perlindungan dari pihak aparat keamanan kecuali dengan membayar dan diperas.

Kerusuhan 13-14 Mei 1998 sebagai bentuk dari rasa tidak suka kaum pribumi terhadap etnis Cina yang biasa disebut sebagai sikap anti etnis Cina merupakan salah satu usaha dari para provokator untuk berusaha merongrong kekuasaan dan kedaulatan pemerintahan. Provokator itu kemudian membakar meletusnya suatu kekacauan dalam masyarakat yang heterogen seperti masyarakat Indonesia ini.

Kerugian yang diderita pemerintah pada peristiwa 12 Mei 1998 sampai pada tanggal 17 Mei 1998 menurut sumber pemerintah tercatat 288 korban tewas akibat kerusuhan serta 101 lainnya menderita luka-luka. Sementara itu kerugian material berupa bangunan dan kendaraan yang dirusak dan dibakar diperkirakan mencapai Rp. 2,5 triliun. Nilai itu berkaitan dengan terbakar dan rusaknya 13 pasar, 2.479 ruko, 40 mal/plasa, 1.604 toko, 45 bengkel, 535 kantor cabang/cabang pembantu/kantor kas, 64 bank, 220 ATM, 383 kantor swasta, 2 kantor kecamatan, 24 restoran, 12 hotel, 9 pompa bensin, 2 rumah ibadah (gereja), 8 bus kota/metromini dan 1.119 mobil dan 821 sepeda motor.⁵

⁵ *Business News*, 20 Mei 1998, hal. 2

Peristiwa yang terjadi pada tgl 13–14 Mei 1998 di Jakarta berawal dari desakan mahasiswa yang didukung oleh hampir semua lapisan masyarakat mendorong Jendral Besar TNI Purn. Soeharto menyerahkan jabatan Presiden RI pada wakilnya, Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie dalam upacara singkat di Istana Negara Jakarta 21 Mei 1998. Peristiwa ini merupakan puncak ketegangan politik yang dipicu dengan penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada Selasa, 12 Mei 1998. Tewasnya empat mahasiswa Trisakti serta cederanya belasan mahasiswa lainnya memicu kemarahan masyarakat.

Bertitik tolak dari keadaan diatas, penulis tertarik untuk menetapkan judul:

FAKTOR PENYEBAB KERUSUHAN ANTI ETNIS CINA BULAN MEI 1998

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Membatasi permasalahan dalam pembahasan suatu penelitian atau penulisan karya ilmiah merupakan hal yang cukup penting, karena permasalahan yang ada tanpa pembatasan mempunyai kecenderungan untuk melebar dan tidak tentu arah. Adanya arah dalam pembahasan ini disatu pihak supaya permasalahan yang ada tidak melebar, sedangkan dipihak lain supaya memperoleh hasil penulisan yang sistematis, berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Atas judul yang telah dikemukakan diatas, dalam penulisan ini, ruang lingkup permasalahan perlu dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi penulisan skripsi ini ditekankan pada faktor sosial, ekonomi dan politik, yang menyebabkan munculnya kerusuhan anti etnis Cina di Jakarta pada periode bulan Mei 1998.

1.2.2 Batasan waktu

Batasan penulisan yaitu sejak naiknya Soeharto tahun 1967 sampai terjadinya kerusuhan 13-14 Mei 1998 di Jakarta, puncak kerusuhan rasial yang telah memakan banyak korban selama pemerintahan rezim Soeharto.

1.3 Problematika

Masalah selalu ada disekeliling kita, oleh sebab itu masalah yang ada perlu dipecahkan. Masalah adalah :

Kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam. Masalah berhubungan dengan ilmu-ilmu senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana (duduknya) dan apa sebabnya.⁶

Permasalahan yang ada meliputi posisi etnis Cina di Indonesia selama 3 zaman: VOC, pemerintah Hindia-Belanda dan pemerintah Republik Indonesia, pada dasarnya sama. Mereka masih dianggap sebagai golongan marjinal walaupun secara ekonomis kedudukan mereka lebih makmur dari kaum pribumi. Yang berarti orang keturunan Cina minoritas tetap dibenci dan dinomorduakan walaupun mereka sudah berusaha membaaur dengan komunitas setempat dan dianggap sebagai entitas

tersendiri. Padahal secara hukum kedudukan mereka sama, yaitu sama-sama sebagai WNI, seperti yang terlihat dari UUD 1945 Pasal 26 (1) “ yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Dan dalam Pancasila butir III “Persatuan Indonesia”, kiranya tidak dapat mengikis perbedaan tersebut.

Atas dasar problematika tersebut penulis merumuskan, faktor – faktor apa saja yang menimbulkan kerusuhan anti etnis Cina di Jakarta pada bulan Mei 1998.

1.4 Kerangka Dasar Teori

Teori mempunyai fungsi sebagai landasan berpijak untuk memecahkan dan menganalisa permasalahan yang diajukan. Secara umum Jack C. Plano mendefinisikan teori sebagai berikut:

Suatu gagasan atau kerangka berpikir yang mengandung penjelasan, ramalan atau anjuran pada setiap bidang penelitian. Dalam ilmu pengetahuan yang empiris (termasuk ilmu politik yang empiris) teori mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat proposisi..... yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan atau kedua-duanya.⁶

Untuk memperjelas permasalahan yang mempengaruhi munculnya sentimen terhadap etnis Cina di Indonesia, penulis menggunakan **konsep – konsep etnis, konflik dan teori konflik.**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan aneka ragam latar belakang baik sosial, ekonomi maupun budaya. Keanekaragaman itu disatu sisi

⁶ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 1979, hal 49.

⁷ Jack C. Plano.et.al., *Kamus Analisa Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 226

merupakan kekayaan budaya bangsa, namun disisi lain keanekaragaman dapat menciptakan potensi konflik.

Konflik mengandung makna “benturan”⁸ seperti perbedaan pendapat, pertentangan, persaingan baik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, antar individu atau bahkan kelompok dengan pemerintah.⁹ Ralf-Dahrendorf menyatakan, konflik adalah “Proses yang timbul dari kekuatan-kekuatan yang bertentangan dalam struktur sosial yang didorong kondisi struktural atau variable yang saling bertentangan”¹⁰.

Michael C. Hudson dan Charles Lewis Taylor mengklasifikasikan konflik ke dalam dua kategori, yaitu konflik politik yang lunak dan konflik politik yang keras¹¹:

1. Konflik politik yang lunak, seperti demonstrasi, unjuk rasa / protes.

Konflik politik yang lunak merupakan konflik yang tidak menimbulkan kekerasan, konflik ini pada umumnya ditemui pada masyarakat yang sudah mendalami apa dasar dan tujuan negara. Konflik ini dapat berwujud suatu pemogokan, unjuk rasa atau demonstrasi, pembangkangan dan sebagainya.

2. Konflik politik yang keras, seperti kerusuhan, huru-hara.

Sedangkan konflik yang berwujud kekerasan pada umumnya terjadi pada masyarakat yang belum mengetahui apa dasar dan tujuan suatu negara. Konflik

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 149

⁹ Pemerintah yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislative dan judikatif

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme Dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafitti, Jakarta, 1988, hal.79

¹¹ *Prisma*, 4 April 1998

ini pada umumnya berdimensi pada politik dan dapat berupa sabotase, terorisme, pembunuhan pemberontakan dan sebagainya.

Sebagai bentuk konflik politik yang keras, kerusuhan Mei 1998 telah dijadikan sarana untuk merebut kembali sumber ekonomi, yang selama ini didominasi etnis Cina. Hal ini timbul disebabkan pengusaha umumnya tidak lagi memikirkan strategi untuk bertahan hidup, melainkan akumulasi modal. Dampak proses ini oleh kelas bawah dianggap sebagai pengurasan aset ekonomi.

Terjadinya konflik antar sesama anggota masyarakat baik sebagai akibat dari keadaan sosial ataupun ekonomi, maupun sebagai akibat dari kesukuan maupun agama, berdampak pada semua lapisan masyarakat, hal ini dikarenakan masing-masing ras mempunyai budaya kebiasaan dan kepentingan yang berbeda-beda. Adanya benturan kepentingan antara mereka pada akhirnya menimbulkan konflik terbuka antar etnis.

Etnik atau etnis adalah :

Identitas kelompok yang sangat eksklusif (dan relatif berskala besar) yang didasarkan pada ide tentang kesamaan asal usul, keanggotaan yang terutama berdasarkan kekerabatan dan secara khusus menunjukkan kadar kekhasan budaya. Dengan pemahaman etnik mencakup kelompok-kelompok yang dibedakan oleh warna kulit, bahasa dan agama atau suku bangsa, ras, kebangsaan dan kasta.¹²

Etnis di Indonesia cukup banyak, yang pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang berasal dari golongan penduduk asli baik dari

Jawa, Sunda, Bali, Manado dan sebagainya, maupun yang berasal dari bukan penduduk asli, yaitu Arab, orang-orang Eropa, maupun Cina. Etnis Cina di Indonesia menduduki peringkat pertama baik ditinjau dari jumlah populasinya, maupun dilihat dari keadaan sosial ekonominya.

Etnis Cina Indonesia menurut Yusu Liem, adalah “orang Indonesia yang berasal dari Cina sejak generasi pertama dan kedua telah tinggal di Indonesia, berbaur dengan penduduk setempat dan menguasai satu atau lebih bahasa yang dipakai di Indonesia”.¹³

Etnis Cina di Indonesia hidup secara berkelompok yang pada umumnya berada di kehidupan perkotaan. Umumnya mereka mempunyai berbagai kelebihan dipandang dari sudut ekonomi dan sosial, keadaan ini yang sering menimbulkan konflik.

Menurut Ramlan Surbakti penyebab konflik dibedakan menjadi dua¹⁴, yaitu:

1. Kemajemukan vertikal

Struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.

2. Kemajemukan horisontal

Konflik yang disebabkan oleh kemajemukan masyarakat yang terpolarisasikan secara kultural seperti perbedaan suku bangsa, daerah. Agama dan ras serta

¹² Larry Diamond & Marc F. Plattener, *Nasionalisme, Konflik Etnik Dan Demokrasi*, ITB, Bandung, 1998, hal.20 a

¹³ Dr. Yusu Liem, *Prasangka Terhadap Etnis Cina*, Pena Klasik, Jakarta, 2000, hal. 66

¹⁴ *ibid*, hal. 151-152

terpolarisasi secara sosial dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal (desa / kota).

Konflik terhadap masyarakat etnis Cina pada umumnya memiliki ciri khas yang menunjukkan garis vertikal dan horisontal, yaitu disamping masalah rasial, juga masalah perbedaan status ekonomi antara orang pribumi yang mengacu pada golongan tak berada dan keturunan Cina yang diidentikkan dengan golongan mampu.

Potensi – potensi konflik ini bertambah besar dengan sikap dan kebijakan pemerintah untuk menunjang dan meningkatkan pembangunan dalam negeri, khususnya pembangunan ekonomi. Dimana modal besar dan kemampuan yang dimiliki konglomerat-konglomerat etnis Cina menjadi modal utama pemerintah untuk mengistimewakan etnis ini. Sikap pemerintah tersebut dirasa menyimpang dari cita-cita integrasi bangsa Indonesia yang selama ini berusaha untuk diwujudkan.

Integrasi menurut Susante adalah:

Salah satu proses dan hasil kehidupan sosial dan merupakan alat yang bertujuan untuk membentuk suatu kesatuan kebudayaan yang homogen.¹⁵

Dalam kehidupan suatu etnik tertentu, seringkali dijumpai gambaran subyektif mengenai etnik atau suku bangsa lain, baik yang bersifat positif atau negatif. Akan

¹⁵Dra. Emiliana Sadilah, dkk., *Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya di DIY*, Depdikbud, Yogyakarta, 1997 hal. 4

tetapi dalam kenyataannya justru stereotip negatiflah yang seringkali muncul dan menghambat terjadinya integrasi nasional.

Sedangkan integrasi nasional adalah:

Penyatuan bagian-bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa¹⁶

Dengan demikian konsep integrasi dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu **pertama** dimensi proses, integrasi merupakan usaha pengendalian antar kelompok agar dapat menghindarkan konflik antara satu dengan yang lain. **Kedua** dimensi hasil, integrasi merupakan suatu kondisi dimana konflik antar etnik sangat kecil dan kerjasama antar etnik sangat kuat.¹⁷

Ini berarti kerusuhan Mei 1998 di Jakarta tidak akan terjadi bila dimensi proses tidak dijalankan secara radikal oleh pemerintah Orba. Sehingga hubungan antar etnik tidak ditentukan oleh pengaruh / kekuasaan, persepsi dan tujuan negara-negara etnik.¹⁸

Secara garis besar terdapat dua strategi kebijaksanaan pemerintah dalam mencapai integrasi nasional¹⁹, yaitu:

¹⁶ Howard Wriggin, "Integrasi Bangsa", dalam Yahya Muhaimin, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1995, hal.51

¹⁷ Emiliana Sadilah, *op.cit*, hal.5

¹⁸ Seperti golongan minoritas yang seringkali tunduk terhadap golongan mayoritas dan dipaksa membaaur dalam kelompok mayoritas

¹⁹ Myron Weiner, "Integrasi Politik Dan Pembangunan Politik", dalam Yahya Muhaimin, *op.cit*, hal. 44

Secara nyata perekonomian nasional berhasil meningkat di satu sisi, namun di sisi lain terjadi perbedaan keinginan antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah lebih menekankan pembangunan pada aspek pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan sedangkan sebagian masyarakat menginginkan pemerataan sebagai sarannya. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpuasan rakyat, yang pada akhirnya memicu kerusuhan sebagai bentuk dari konflik terbuka dengan kekerasan massa sebagai mediator penyalurannya.

Dengan kata lain konflik merupakan kritik terhadap pembangunan²⁰ dalam artian pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keadilan akan melahirkan konflik yang rawan bagi negara dengan tingkat keragaman tinggi baik dari segi ekonomi, sosial / kultur (etnis-agama). Kerusuhan berawal dari perbedaan pandangan ataupun pendapat antara individu atau kelompok.

1.5 Hipotesa

Hipotesa merupakan suatu kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya Sutrisno Hadi menyatakan :

Dugaan yang mungkin benar atau mungkin juga salah, ia akan ditolak kalau salah satu salah atau palsu, dan akan diterima jika fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesa yang begitu tergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan.²¹

²⁰ Aloysius Gunadi Brata, *Konflik Di Masa Kritis: Studi Empiris Determinasi Ketidakadilan Sosial Ekonomi*, Analisis CSIS, No. 3 Tahun XXXI/2002, hal. 325

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1991, hal. 63



1. Kebudayaan suku bangsa yang dominan dalam suatu negara dijadikan sebagai kebudayaan nasional. Dimana identitas golongan minoritas ditundukkan pada kebudayaan suku yang dominan. Kebijakan ini biasa disebut *assimilasionis*.
2. Pembatasan kesetiaan nasional yang dilakukan dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok minoritas. Kebijakan ini biasa disebut “Bhineka Tunggal Ika”.

Bentuk masyarakat Indonesia yang majemuk malah menuntun pemerintah Orba menerapkan kebijakan asimilasi bukan Bhineka Tunggal Ika, dengan asumsi bahwa asimilasi dirasa mampu meredam konflik antar etnis. Penerapan strategi tersebut tak terlepas dari adanya penekanan strategi pembangunan pemerintah Indonesia masa Soeharto pada peningkatan perekonomian nasional, yang berimplikasi dengan adanya perbedaan orientasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang menjadi orientasi utama pemerintahan Soeharto harus bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu konflik antar etnis Cina dengan pribumi yang sudah ada sejak jaman Belanda harus segera dicarikan solusinya, supaya stabilitas negara tidak terganggu dan program pemerintah dapat berjalan. Tidak adanya konflik selama beberapa waktu (1960-1974) membuat Soeharto yakin bahwa proses asimilasi, berhasil. Keberhasilan Orba mengatasi masalah rasial membuat Soeharto lebih memprioritaskan etnis Cina sebagai penarik investor asing.

Atas dasar permasalahan yang telah diajukan sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesa, bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusuhan anti etnis Cina 13 – 14 Mei 1998 adalah :

1. Kesenjangan ekonomi antara etnis Cina dan pribumi dan eksklusifisme etnis Cina sebagai sebab dari kurang berhasilnya program asimilasi pemerintah membangkitkan kembali prasangka anti terhadap etnis Cina yang telah ada sejak lama.
2. Krisis politik dan ekonomi tahun 1998 semakin memperparah prasangka rasial terhadap kaum etnis Cina.
3. Adanya peran elit partai politik, kelompok Islam kanan dan golongan militer yang diduga menyulut kerusuhan untuk melampiaskan ketidaksukaan mereka terhadap etnis Cina dan sebagai upaya menurunkan Soeharto.

1.6 Metode

Metode penelitian selalu menggunakan langkah-langkah kegiatan ilmiah yang bertujuan memperoleh pemahaman yang cukup terhadap permasalahan yang diteliti. Winarno Surachmat mengatakan bahwa metode penelitian adalah : “Cara utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan tehnik serta alat-alat tertentu”²²

Dilain pihak The Liang Gie menyatakan :

Metode yaitu cara atau langkah yang berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala-gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut.²³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif. Metode diskriptif adalah “Metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka”.²⁴

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pengertian dari metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data²⁵ Sumber data apabila dilihat dari sifatnya, pada prinsipnya dapat dibagi menjadi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya: diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

²² Winarno Surahman, *Dasar-Dasar Dan Tehnik Research*, Tarbita, Bandung, 1997, hal.22

²³ The Liang Gie, *Politik: Suatu Pembahasan Tentang Lingkungan Dan Metodologi*, Yogyakarta, 1969, hal.12.

²⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal.64

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Bina Aksara, 1998, hal. 134

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari Biro Pusat Statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Karena itu perlu adanya pemeriksaan ketelitian. Bukan berarti bahwa data sekunder kalah bermutu dibandingkan dengan data primer, bahkan kalau mungkin data sekunder dicari lebih dahulu, barangkali ada yang cocok dengan tujuan penelitian

Data sekunder diperoleh dari perpustakaan yang berupa buku-buku ataupun surat kabar, atau bahan pendukung lainnya. Pengumpulan data sekunder ini didapatkan dari perpustakaan FISIP UNEJ, UPT perpustakaan UNEJ serta perpustakaan CSIS.

1.6.2 Metode Analisis

Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah apa saja yang dianggap benar pada semua peristiwa, kelas atau jenis berlaku pula juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk kedalam kelas atau jenis itu.²⁶ dengan demikian, maka timbulnya konflik vertikal horisontal antara pri dan non pribumi merupakan pembenar terhadap anggapan para ahli bahwa kesenjangan merupakan ketegangan sosial dalam krisis ekonomi.

1.7 Pendekatan

Suatu permasalahan dalam karya tulis memerlukan pendekatan untuk memudahkan pembatasan. Pendekatan menurut The Liang Gie, adalah keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran memasuki bidang ilmu dan memahami pengetahuan teratur dan bulat mengenai sasaran yang ditelaah oleh ilmu pengetahuan tersebut.²⁷

Dengan bertitik tolak pada permasalahan yang telah diajukan, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sejarah (*historical approach*)²⁸ dan ekonomi politik. Pendekatan sejarah merunut dari politik diskriminasi rasial yang menyulut terjadinya konflik 13-14 Mei 1998 di Jakarta.

Pendekatan ekonomi politik digunakan untuk memahami konflik antar golongan yang bersumber pada bidang etnopolitik. Mengingat bahwa ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan politik maka sudah barang tentu kekuasaan golongan etnis Cina dalam bidang ekonomi akan mempunyai akibat pula dalam mekanisme politik di Indonesia. Dimana menurut Arbi Sanit, hubungan keduanya akan terletak pada penggunaan “kekuasaan pemaksa secara sah” didalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat.²⁹ Struktur dan kondisi ekonomi masyarakat etnis Cina menjadi sangat penting artinya bagi kehidupan politik di Indonesia. Ini dapat

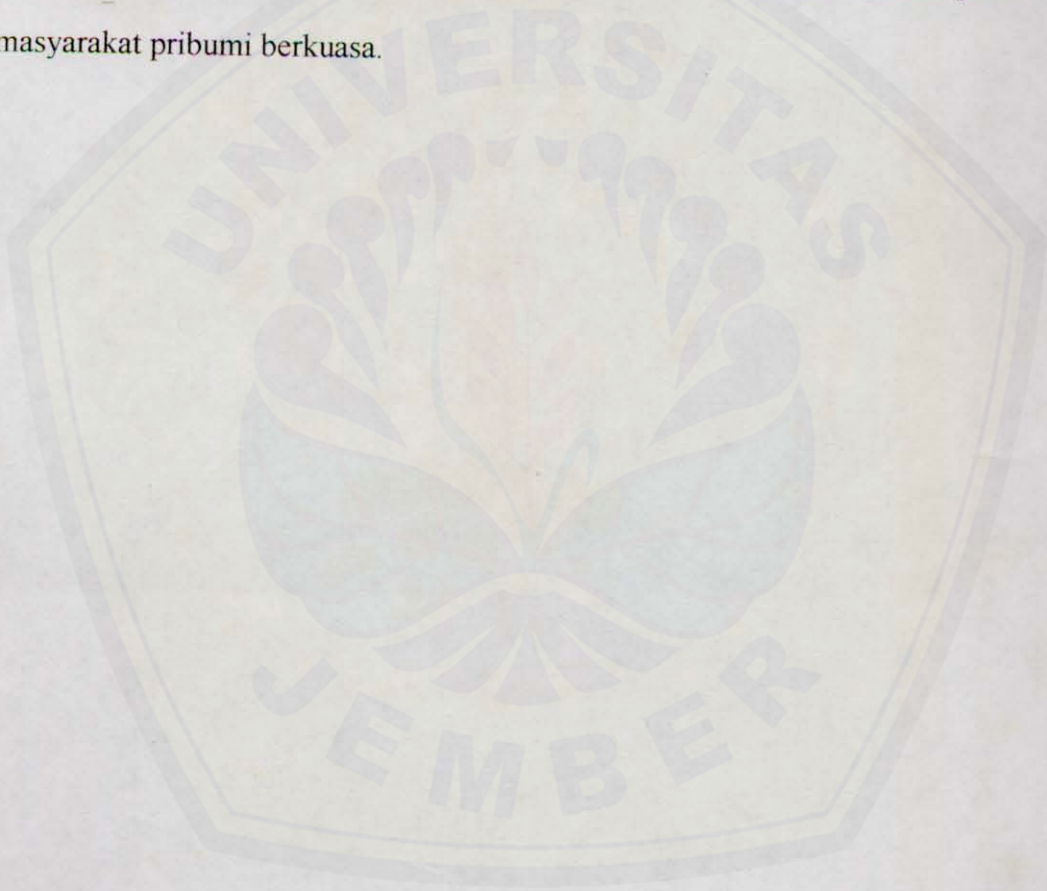
²⁶ Sutrisno Hadi, *loc.cit*

²⁷ The Liang Gie, *op.cit*, hal.81.

²⁸ Pendekatan yang menggunakan suatu diskripsi kronologis mengenai berbagai hal baik itu bersifat institusional atau non institusional dalam kehidupan suatu negara (sos-pol) dalam kebijakan dalam negeri maupun dalam hubungan dengan negara lain, lihat The Liang Gie, *Ilmu Politik*, *ibid* hal. 79

²⁹ Drs. Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 121

dilihat dalam bentuk semakin tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik dan ekonomi. Dengan semakin meluasnya proses pertumbuhan ekonomi modern, terutama setelah adanya kebijakan *open door policy* dalam pembangunan keuangan, konstruksi, dsb. Sementara sektor tradisional yang berada ditangan mayoritas rakyat semakin tertinggal jauh di belakang. Sehingga kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Belanda secara luas kembali mereka nikmati pada waktu masyarakat pribumi berkuasa.





BAB II

PERKEMBANGAN ETNIS CINA DI INDONESIA

2.1 Keberadaan Etnis Cina di Indonesia

Etnis Cina datang ke Indonesia sejak tahun 1293³⁰, ketika Kaisar Kubilai Khan dari Dinasti Yuan memerintahkan pasukannya menyerbu pulau Jawa dan memberi pelajaran kepada raja Kertanegara dari kerajaan Singasari yang dianggap membangkang. Gagal melaksanakan tugasnya, pasukan Kubilai Khan takut kembali kenegaranya dan membentuk koloni-koloni etnis Cina, membaaur dengan penduduk setempat melalui perkawinan³¹ dan bertempat tinggal di Indonesia serta mulai berdagang, secara kecil-kecilan baik secara menetap maupun menjadi pedagang keliling ataupun pedagang kelontong.

Ketika Belanda tiba di Indonesia pada abad 16, penduduk peranakan etnis Cina telah memainkan peranan penting dibidang perdagangan, khususnya dalam *international trade* (Tiongkok-Indonesia dan India-Indonesia). Didalam negeri mereka juga berperan dalam jaringan distribusi hasil bumi masyarakat dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sehingga barang dari desa bisa masuk ke kota dan begitu juga sebaliknya. Keadaan ini dirasa dapat mengancam stabilitas dan pengaruh

³⁰ Benny G. Setiono, *Etnis Tionghoa Adalah Bagian Integral Bangsa Indonesia*, makalah yang disampaikan pada diskusi akbar yang diselenggarakan Perhimpunan INTI Jakarta pada tanggal 27 April 2002

³¹ Pada abad ke-18 kadar kawin campur mulai menurun perlahan-lahan dan akhirnya peranakan etnis Cina kawin diantara mereka sendiri.

Belanda, oleh karena itu Belanda memutuskan untuk memihak etnis ini dan dijadikan rekan dalam menarik pajak atas hasil bumi rakyat.

Kesan dilindungi dan menjadi sekutu Belanda muncul dikalangan masyarakat dan mengakibatkan masyarakat pribumi marah dan tidak suka akan keberadaan etnis tersebut. Karena merasa terancam keberadaannya, mengakibatkan exodusnya peranakan Tionghoa menuju daerah-daerah yang dikuasai Belanda tidak dapat terelakkan dan dipungkiri. Ledakan rasialis yang terjadi kemudian digunakan sebagai senjata Belanda untuk mempengaruhi opini dunia bahwa RI tidak mampu menjaga keamanan dalam negerinya sendiri.

Menjelang tahun 1860 jumlah etnis Cina diperkirakan berjumlah 222.000 orang, dua pertiga dari penduduk itu berdomisili di Jawa³². Terjadinya imigran Cina secara besar-besaran ini didorong oleh 2 faktor. **Pertama** adanya kelonggaran pembatasan para imigran yang diberikan oleh pemerintah Belanda terhadap daerah kolonial bahkan pada daerah yang belum menjadi kekuasaan Belanda. **Kedua** mengalirnya para buruh Cina ke daerah-daerah perkebunan baik yang berada di pulau Sumatera maupun ke pulau Bangka. Perkembangan para imigran etnis Cina terus berkelanjutan, berdasarkan sensus bulan November 1920 jumlah orang Cina di Indonesia seluruhnya ada 809.647 orang yang terdiri dari 518.355 laki-laki dan 291.292 wanita. Dari jumlah 384.218 orang tinggal di berbagai kota di Pulau Jawa dan sisanya tinggal di luar Pulau Jawa. Di Sumatra ada 134.750 orang, di Kalimantan

³² Benny G. Setiono, *loc.cit*

Barat 67.787 orang, di Bangka 67.398 orang, di Ambon ada 1.411 orang, di Ternate ada 1.475 orang dan di Irian Jaya ada 1.243 orang³³. Dan umumnya seperti di Jakarta mereka dikonsentrasikan di daerah Pecinan. Mereka diharuskan melaksanakan adat istiadat tradisional asli Cina, sehingga identitas mereka tetap beda dengan golongan-golongan lainnya. sehingga pada tahun 1961 jumlah imigran Cina atau Tionghoa di Indonesia mencapai 2.450.000 orang. Dari jumlah tersebut 50,2 % atau 1.230.000 orang berada di Jawa, 690.000 atau 28,2 % di Sumatera, 315.000 atau 12,9 % di Kalimantan Barat, sedangkan sisanya berada di kepulauan-kepulauan lainnya.³⁴

Para imigran Cina sebagian besar berasal dari suku bangsa Hokkian dari daerah Fukian dan Kwantung. Kedatangan ke Indonesia didorong adanya dua faktor, yaitu **faktor pendorong** seperti kekacauan, kemiskinan dan kepadatan penduduk di daratan Tiongkok. **Faktor penarik** seperti lowongan kerja dan kesempatan yang dibuka oleh Kolonial Belanda. Mereka pada umumnya mempunyai kehidupan disepanjang pantai pulau Jawa yang pada awalnya bekerja sebagai buruh pada perkebunan atau perusahaan-perusahaan, namun ada sebagian yang berupaya untuk berdagang secara kecil-kecilan atau menjadi pedagang kelontong dan pedagang keliling. Di zaman penjajahan Belanda kelompok minoritas keturunan Cina digunakan sebagai alat ekonomi untuk mengeksploitasi ekonomi Indonesia.

³³ Hidayat Z.M., *Masyarakat Dan Kebudayaan Cina Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1977, hal. 83

³⁴ Charles A. Coppel, *op.cit*, hal.22. Jumlah penduduk Tionghoa tahun 2000 dapat dilihat dalam lampiran 1

Ditangan 200.000 penduduk Belanda diatas sekitar 2 juta minoritas Huaqiao digunakan sebagai buffer (sasaran) terhadap 70 juta rakyat pribumi.³⁵ Keunggulan suku tersebut sebagai perantau dalam bidang perdagangan memberikan mereka posisi ekonomis yang kuat menghadapi mayoritas pribumi.

2.1.1. Etnis Cina dan Kewarganegaraan.

Ketidakjelasan status kewarganegaraan etnis Cina ini sebenarnya telah ada sejak pemerintah Belanda menjajah Indonesia. Semisal, tanggal 10 Februari 1901 pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan undang-undang tentang ke-kawula-an Belanda (*Nederlandsch Onderdaanschap*)³⁶, mereka yang terlahir di Hindia Belanda menurut asas jus soli adalah kawula Belanda, tanpa menyebutkan kemungkinan untuk naturalisasi³⁷. Sebagai kawula Belanda, posisi mereka seharusnya lebih baik dari pribumi, namun pada kenyataannya status mereka disamakan dengan warga pribumi walau tetap dianggap sebagai Timur Asing. Apalagi ternyata UU Kawula Belanda itu lebih mengikat pada batasan teritorial dalam hubungan diplomatik, artinya seorang warga keturunan Cina peranakan yang berkunjung ke tanah leluhurnya harus memegang paspor Belanda. Itulah sebabnya mengapa orang Indonesia secara umum masih menganggap bahwa orang Cina atau orang Tionghoa merupakan orang asing baik secara politis, hukum maupun secara kultural. Secara politis Warga Negara Indonesia (WNI) adalah merupakan warga negara Indonesia baik itu yang berasal dari

³⁵ Roeslan Abdulgani, "Pribumi Dan Nonpri Dalam Era Reformasi", dalam Moh. Sa'dun, *ibid*, hal. 24

³⁶ Mona Lohanda, "Masalah Cina Dalam Perjalanan Sejarah Indonesia", dalam Andreas Pardede, *Antara Prasangka Dan Realita*, Pustaka Inspirasi, Jakarta, 2002, hal. 57

penduduk asli maupun berasal dari orang asing yang menjadi warga negara, termasuk orang Tionghoa. Namun kadang-kadang banyak anggota masyarakat yang memberikan arti yang berlebihan karena WNI dianggap sebagai warga negara keturunan. Keadaan ini tidak dapat disalahkan begitu saja, sebab pada pemerintahan Belanda, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, dibagi menjadi dua golongan yaitu: **pertama** golongan pribumi atau penduduk asli (*inlander*) dan **kedua**, penduduk Tionghoa digolongkan menjadi Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*).

Dalam UUD 1945 pasal 26 (1) dinyatakan bahwa “Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Hal ini berarti bahwa penduduk asli secara otomatis menjadi warga negara, sedangkan orang Tionghoa atau etnis Cina yang bukan penduduk asli, bukan warga negara. Mereka dapat menjadi warga negara apabila telah memenuhi segala ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Edward Ryall menyatakan orang Tionghoa adalah “ seorang asing tanpa memperhatikan tempat kelahirannya atau asal-usul kakeknya, yang berlawanan dengan penduduk asli atau penduduk asli karena kelahiran”³⁸. Dilain pihak Skinner

³⁷ Suatu proses pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan

³⁸ Charles A. Coppel, *op.cit*, hal.24

menyatakan “orang Tionghoa adalah seorang Tionghoa apabila ia berfungsi sebagai anggota dari dan bergabung dengan masyarakat Tionghoa...”³⁹

Tahun 1946 pemerintah RI merumuskan suatu undang-undang kewarganegaraan yang berbunyi

Semua orang Cina yang lahir di Hindia Belanda dan telah bertempat tinggal berturut-turut selama 5 tahun secara otomatis dianggap warga negara Indonesia kecuali apabila mereka mengambil langkah-langkah tertentu untuk menolaknya dan memilih kebangsaan Cina.⁴⁰

Setelah undang-undang tersebut diturunkan hanya sedikit saja dari orang-orang etnis Cina yang mencatatkan pilihannya, karena dirasa tidak adanya kebutuhan untuk melakukan hal itu. Akibatnya timbul keragu-raguan di hati kebanyakan penduduk Indonesia tentang kesetiaan yang sungguh-sungguh dari orang-orang Cina sebagai warga negara Indonesia.

Pembedaan status juga didapatkan ketika mereka berinteraksi dengan birokrasi. Pelayanan netral yang seharusnya diberikan kepada masyarakat justru dijadikan sebagai alat kekuasaan. Disini birokrasi berfungsi sebagai lembaga yang dapat menentukan mana yang baik dan mana yang tidak. Dalam banyak kasus pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pengajuan pencatatan sipil, misalnya menjadi lebih mahal dan berbelit bagi minoritas etnis Cina

³⁹ *ibid*

⁴⁰ BP. Paulus, *Masalah Cina : Hasil Penelitian Di Beberapa Negara Asia Dan Australia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976

dibandingkan dengan etnis lain. Apalagi aturan yang digunakan dalam pencatatan kelahiran masih menggunakan aturan kolonial yang diskriminatif, seperti:⁴¹

- a. Stb. 1849-25 pencatatan kelahiran untuk golongan Eropa
- b. Stb. 1917-130 jo 1919-81 pencatatan kelahiran Tionghoa
- c. Stb. 1920-751 jo 1927-564 pencatatan kelahiran golongan Indonesia (Islam)
- d. Stb. 1933-75 jo 1936-607 pencatatan kelahiran untuk golongan Indonesia (Kristen)

Akibatnya anak yang lahir dari warga negara asing (RRT) akan dicatat dengan dasar Stb. 1917-130 jo 1919-81, begitu juga anak yang lahir dari WNI etnis Cina.

Perlakuan diskriminatif terhadap etnis Cina juga terlihat pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. X.01 tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk. Inmendagri itu memerintahkan agar dalam KK dan KTP WNI keturunan asing supaya dicantumkan tanggal dan nomor Surat Bukti Kewarganegaraan (SKB) dengan menyebutkan instansi yang mengeluarkan SKB itu. Atas dasar instruksi tersebut, Dinas Kependudukan mengirim surat bersifat rahasia kepada para Lurah se-DKI Jakarta No. 643/DPK/III/1978 tanggal 10 Maret 1978 dengan ketentuan memberikan kode pada nomor KTP bagi WNI keturunan asing⁴².

⁴¹ Irianto Subiakto, "Ketika Produk Hukum Melegalisasi Praktek Diskriminasi", dikutip dalam Andreas Pardede, *op.cit*, hal. 184

2.1.2 Perkembangan Ekonomi Etnis Cina

Golongan minoritas Cina memegang peranan dalam menentukan kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Pada waktu kaum emigran Cina datang ke Indonesia kehidupan penduduk pribumi tergantung dari hasil pertanian dalam struktur masyarakat feodal. Penduduk pribumi tidak menyukai usaha perdagangan, oleh karena itu orang Cina menempati kesempatan ini sehingga dengan segala kelebihan yang mereka punyai pada akhirnya mereka dapat menguasai sektor perdagangan disemua lapisan masyarakat. Keberadaan dan kemampuan orang Cina dibidang perdagangan sejak masa Hindia Belanda telah diakui. Seperti pendapat Raffles, dengan mengatakan bahwa "*they are the life and soul of the commerce of the country*"⁴³.

Pada abad ke-13 orang Cina telah mengadakan hubungan perdagangan dengan Indonesia. Obyek dagang pada waktu itu adalah beras, lada dan gula. Disamping berniaga mereka juga menggarap tanah pertanian, menanam merica dan bercocok tanam. Pada umumnya orang Cina yang pertama datang ke Indonesia terdiri dari kaum laki-laki saja. Namun, setelah PD I berakhir banyak orang Cina mulai berdatangan ke Indonesia, mereka kebanyakan berasal dari Fukien, Kwantung, termasuk didalamnya suku bangsa Hokkien, Hikka dan Kanton.

Tahun 1843 Belanda dengan politik etisnya menjadikan orang Cina patner dalam usaha perdagangannya sebagai perantara dengan kaum pribumi untuk barang-

⁴² Indradi Kusuma, *Diskriminasi Dalam Praktek*, DPP-FKKB, Jakarta, 2002, hal.17

⁴³ Melly G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa Di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1979, hal. 30

barang impor. Dan sejak abad ke-18 kedudukan orang Cina makin kuat, hal ini mengakibatkan semakin pentingnya keberadaan orang Cina baik bagi golongan pribumi maupun bagi orang Belanda.

Tahun 1925 etnis Cina mampu menyumbang 63,80% dalam pembayaran pajak pendapatan bagi mereka yang berpenghasilan antara 120-1.200 gulden, antara 1.200-10.000 gulden dan 10.000 keatas⁴⁴

Tabel 1 Pembayaran Pajak Pendapatan Tahun 1925

Penghasilan (gulden)	Eropa (Belanda)%	Timur Asing (Tionghoa) %	Pribumi %
120-1.200	10,84	52,74	23,18
1.200-10.000	57,77	10,60	0,36
10.000	8,59	0,46	-
Total	77,20	63,80	23,54

Sumber Leo Suryadinata, "Pemikiran Politik Minoritas Tionghoa di Indonesia", hal 57

Menurut catatan pada tahun 1930, dari jumlah 1.233.000 orang Cina yang berada di Indonesia, sejumlah 470.000 orang diantaranya sebagai pengusaha dalam berbagai jenis usaha, yaitu pengusaha bank, perdagangan, industri dan pertanian.⁴⁵

Orang Cina di P. Jawa kebanyakan sebagai pedagang sedangkan yang di luar P. Jawa kebanyakan sebagai pengusaha atau sebagai buruh pada pertambangan dan perkebunan, sedangkan yang lainnya bekerja sebagai pegawai yang bekerja pada firma-firma dan toko-toko milik orang Eropa.

Pada masa revolusi mereka tetap tidak melepaskan tujuan usahanya, terutama perdagangan. Orang Cina tetap menjalankan usaha dagangnya baik saat berada

dibawah daerah kekuasaan RI maupun saat berada di daerah kekuasaan Belanda. Dimana justru pada saat itu penduduk pribumi mencurahkan dan mengkhususkan diri mengusir penjajah.

Kerjasama Belanda dengan orang Cina berakhir pada tahun 1850⁴⁶, sehingga terjadi kekosongan terhadap barang-barang kelontong, dan hal ini dimanfaatkan oleh orang Cina. Hal ini berakibat beralihnya kepemilikan perusahaan-perusahaan besar, perantara dagang, perusahaan kecil dan pengecer, sebagian besar ada ditangan orang Cina.

Majunya usaha perdagangan, industri serta pertambangan makin menyedot masuknya orang Cina ke Indonesia, sehingga banyak diantara mereka yang menetap sebagai perantau di Indonesia. Sejak itu muncullah kota-kota perdagangan, kota pertambangan serta kota industri di seluruh Indonesia, terutama didaerah pantai. Sebagai perantau mereka berusaha keras untuk sukses dalam bidang perdagangan, industri, pertambangan dan perbankan. Oleh sebab itu sedikit sekali dari orang Cina yang memiliki orientasi pada kehidupan politik, kecuali kehidupan politik yang berhubungan erat dengan usaha perekonomian mereka. Pada awal kemerdekaan setelah keadaan aman, usaha orang Cina makin lancar dan berkembang sedangkan masyarakat pribumi baru mulai membangun usaha ekonominya setelah menyadari ketertinggalan mereka di bidang perdagangan, perbankan, industri dan hubungan perdagangan luar negeri dari etnis Cina.

⁴⁴ Leo Suryadinata, *Negara Dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2002, hal. 57

⁴⁵ Hidayat, Z.M., *op.cit*, hal.83

Dengan adanya kenyataan ini pemerintah mulai mengadakan pembatasan-pembatasan usaha kepada orang-orang etnis Cina, khususnya bagi mereka yang masih warga negara asing. Pembatasan ini mulai berlaku dengan adanya peraturan No. 10 tahun 1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibukota daerah swatantra tingkat I dan II serta Karisedenan⁴⁷.

Berlakunya peraturan itu berarti terjadinya pemindahan pengusaha etnis Cina terpusat di kota, yang mengakibatkan terdesaknya para pengusaha pribumi yang telah ada di kota.

2.1.3 Dominasi etnis Cina dalam bidang ekonomi

Hubungan antar etnis baru menimbulkan permusuhan dan kekerasan bila perbedaan antar etnis disertai dengan adanya dominasi oleh suatu etnis terhadap etnis yang lainnya, entah dibidang ekonomi maupun politik. Hubungan dominasi itu sendiri pada dasarnya mengandung suatu kekerasan yang bersifat struktural dalam dirinya karena hubungan itu bukan merupakan hubungan setara melainkan merupakan keunggulan yang dominan disatu pihak dan ketergantungan yang relatif besar pada pihak lainnya. Dominasi tersebut kemudian menimbulkan represi langsung oleh pihak yang kuat dalam bidang politik atau perbedaan yang besar dalam penguasaan ekonomi maka cepat atau lambat akan muncul perlawanan dari pihak yang mengalami represi atau ketergantungan. Menyusul kemudian konflik antara

⁴⁶ *ibid*, hal.90

⁴⁷ Andreas Pardede, *Antara Prasangka Dan Realita: Telaah Kritis Wacana Anti Cina Di Indonesia*, Pustaka Inspirasi, Jakarta, 2002, hal. 199

pihak yang menguasai dan pihak yang merasa dikuasai, dimana konflik ini kalau mengalami eskalasi berkembang menjadi kekerasan.

Strategi ekonomi Orba yang berorientasi pada pertumbuhan membuka kesempatan luas bagi etnis Cina untuk berkiprah secara maksimal dalam setiap proses pembangunan ekonomi. Modal, keahlian, pengalaman, ketrampilan, penguasaan teknologi dan jaringan diperlukan untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dan peningkatan produksi. Etnis Cina merupakan asset yang dianggap berguna untuk segera mendorong pertumbuhan. Banyak contoh menunjukkan bagaimana langkah-langkah pemerintah mempromosikan modal Cina, yang meliputi perbankan, asuransi, real estate, perkebunan, manufaktur dan lain-lain.

Berbagai kebijakan telah menciptakan kesempatan luas bagi etnis minoritas ini untuk berkembang. Jaringan yang mereka miliki pada tingkat lokal, regional maupun global semakin mengukuhkan kekuatan ekonomi mereka. Jaringan kerja mereka sejak kegiatan ekonomi tahun 1990-an hingga kini mendominasi kegiatan ekonomi wilayah Asia, termasuk Indonesia. Sebenarnya masyarakat etnis Cina adalah masyarakat yang masih memiliki tradisi emigran⁴⁸. Sikap ulet, suka bekerja keras, fleksibel dan punya rasa solidaritas yang tinggi, sehingga karenanya cenderung eksklusif menciptakan suatu jaringan bisnis yang tidak dimiliki oleh etnik selain etnik Cina. Ada empat lingkaran jaringan bisnis etnis Cina di wilayah Asia Timur dan

⁴⁸ A. Dahana, "Cina Perantauan, Linkage Ekonomi Dan Upaya Pembauran", dalam Moh. Sa'dun, *op.cit.*, hal. 162

Tenggara: lingkaran pedesaan, lingkaran perkotaan, lingkaran regional dan lingkaran global⁴⁹. Keempat lingkaran tersebut terjalin menjadi jaringan-jaringan bisnis yang ekstensif dan bisa diandalkan dengan cepat untuk memobilisasi modal, barang kebutuhan produksi, informasi dan jaringan distribusi.

Menguatnya jaringan kerja dan perilaku hubungan antara jaringan tersebut terjalin antar sesama migran etnis Cina dimanapun tempat yang mereka tempati sebagai negara harapannya. Situasi dan kondisi menguatnya jaringan tersebut mendorong usahawan etnis Cina mendirikan usahanya sampai ke pelosok desa. Etnis Cina di Indonesia telah lama menunjukkan kekuasaannya di bidang ekonomi utamanya perbankan dan perdagangan. Di sektor perbankan etnis Cina diperkirakan paling tidak menguasai 61 % saham mayoritas, sejumlah 118 bank yang tumbuh subur di negeri ini dengan aset pada akhir tahun 1997 mencapai Rp. 247,6 triliun. Sedangkan golongan pribumi hanya menguasai 75 bank atau sekitar 39% dengan aset sebanyak Rp. 170,7 triliun. Di bidang perdagangan, etnis Cina diperkirakan menguasai distribusi 70 % dan golongan pribumi hanya 30 %.⁵⁰

Merujuk pada data Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) ditahun 1997 di Indonesia terdapat 300-an perusahaan konglomerasi milik swasta, 197 atau sebesar 65 % diantaranya dikuasai oleh nonpri, 83 atau sekitar 35 % group dikuasai oleh pribumi dan 18 group merupakan perusahaan patungan antara keduanya.⁵¹ Dari 300 group

⁴⁹ Alexander Irwan, *Jejak-Jejak Krisis di Asia Tenggara: Ekonomi, Politik, Industrialisasi*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal.183

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ *Warta Ekonomi*, 31 Januari 1997

konglomerasi ini, Salim Group sempat menduduki papan paling atas dengan asset lebih dari US\$ 3,5 milyar (tahun 1980-an), disusul Sinar Mas, Astra, Djarum, Gudang Garam, Lippo, Dharmala, Jan Darmadi, Mantrust dan Nusasamba dengan asset seluruhnya ditaksir ada diatas US\$ 100 juta (atau Rp. 400 milyar). Tahun 1992, 21 perusahaan milik nonpri berhasil memasuki dub diatas satu trilyun dengan nilai penjualan Rp. 61,5 trilyun atau 46,6 %⁵² Sedangkan 41 group digolongkan kedalam kelompok penjualan antara Rp. 500 milyar sampai satu trilyun dengan nilai penjualan Rp. 26,8 trilyun atau 33,1% dari nilai penjualan total 300 konglomerasi yang ada.⁵³ Pada tahun yang sama pula, dari 12.657 perusahaan yang dimiliki konglomerat pri dan nonpri 9347 buah atau 74% dimiliki konglomerat etnis Cina. Sedangkan dari jumlah seluruh asset yang diperkirakan sekitar US\$ 32.372.000.000, US\$ 25.887.000 atau kurang lebih 80% dikuasai oleh mereka.⁵⁴

Data diatas dapat dijadikan indikator dominasi ekonomi nasional oleh etnis Cina, apalagi sektor pasar tradisional dan pedagang asongan non formal yang umumnya dikuasai pribumi, sekarang dihantui supermal-supermal yang dimiliki non pri dan hampir semua sektor perdagangan terutama perbankan dikuasai oleh kelompok minoritas tersebut. Keadaan ini memperparah kesenjangan sosial yang menimbulkan kerusuhan, perusakan dan penjarahan.

⁵² *Info Bisnis*, 12 Agustus 1994

⁵³ *Warta Ekonomi*, 8 Maret 1994

⁵⁴ *Info Bisnis*, 14 Januari 1997

Kurangnya kesempatan bergerak dibidang lain seperti ABRI maupun Pegawai Negeri mendorong minoritas ini bergerak di sektor bisnis dan semakin dominanlah mereka.

Dominas mereka dibidang ekonomi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Sebagai warga keturunan imigran yang meninggalkan tanah leluhurnya karena kesengsaraan dan ancaman penderitaan, mereka mempunyai *survival instinct* yang kuat⁵⁵ dan untuk menjaga *instinct*-nya ia harus mampu mengembangkan usahanya dimanapun ia berada. Dari sini naluri bisnis mereka menguat sedangkan sebaliknya naluri bisnis pribumi telah dihancurkan oleh Belanda guna mencegah timbulnya kekuatan ekonomi pribumi.
- b. Etnis Cina lebih siap di bidang ekonomi dibandingkan pribumi karena pada masa penjajahan di Indonesia warga pribumi lebih mencurahkan daya dan dananya untuk perjuangan kemerdekaan sedangkan etnis Cina sepenuhnya mengkonsentrasikan diri dibidang ekonomi khususnya perdagangan, tanpa peduli terhadap lingkungan sosial dimana ia berada⁵⁶.
- c. Kebijakan pemerintah yang mengkonsentrasikan etnis Cina hanya bergerak dibidang ekonomi.

⁵⁵ *Republika*, 30 Oktober 1997

⁵⁶ Pernyataan itu dikemukakan oleh Ketua DPA Baramuli dalam Forum Diskusi Panel Nasional Fisipol Universitas Warmadewa Denpasar, Kuta, Bali pada tanggal 13 Maret 1999. Lihat Media Indonesia, 15 Maret 1999



2.2 Kebijakan integrasi nasional pemerintah Indonesia

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu sistem politiknya juga sedang mencari bentuk yang selaras dengan tingkat perkembangan masyarakat maupun kultur dan struktur masyarakatnya. Masalahnya, masyarakat negara sedang berkembang memiliki struktur masyarakat majemuk secara kultur sehingga sukar untuk menciptakan identitas yang disepakati bersama. Konsep Bhineka Tunggal Ika seharusnya tidak membuat bangsa Indonesia harus terpecah dan mengalami banyak masalah kesukuan dalam tubuh dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Apalagi masalah antara kelompok keturunan Cina dengan kelompok pribumi. Menurut Dede Oetomo, "hal itu merupakan sesuatu yang salah besar dari segi ilmu pengetahuan. Orang etnis Cina maupun yang menganggap dirinya etnis Cina secara biologis telah bercampur karena perkawinan nenek moyangnya dengan orang-orang pribumi"⁵⁷. Melalui berbagai hubungan perkawinan dan kekerabatan orang-orang etnis Cina seharusnya dapat digolongkan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat-masyarakat suku bangsa setempat.

Perspektif antropologi mencermati bahwa sikap masyarakat Indonesia yang seperti ini terwujud sebab sebagian masyarakat yang mendiami suatu wilayah merasa mempunyai hak atas wilayahnya⁵⁸. Sehingga ada kecenderungan untuk mengelompok diantara sesama bangsanya. Setiap masyarakat suku bangsa selalu dikaitkan dengan suatu wilayah yang merupakan tempat asal dan kehidupan dari suku bangsa tersebut.

⁵⁷ Dede Oetomo, "Bersentuhan Dengan Prasangka Dan Diskriminasi Kita", dalam Andreas Pardede, *op.cit*, hal. 18

Klaim atas sesuatu wilayah menjadi penting dalam permasalahan kesukubangsaan, yaitu keaslian dari kepribumian kesukubangsaan

Umumnya negara (*state*) di Asia Tenggara bisa dibagi atas dua jenis: negara pribumi (*indigenous state*) dan negara imigran (*immigrant state*). *Indigenous state* lebih didasarkan pada *ethno nation* (bangsa berdasarkan ras / etnis) sedangkan *immigrant state* didasarkan pada *social nation* (bangsa yang berdasarkan multiras / multi etnis)⁵⁹

Konsep bangsa Indonesia yang seharusnya didasarkan pada *social nation* pada kenyataannya lebih cenderung pada *ethno nation*, karena pemerintah Orba lebih menitikberatkan pada kepribumian. Orang peranakan Cina harus melebur ke dalam tubuh pribumi Indonesia dan menjadi pribumi, barulah ia bisa disebut sebagai warga negara Indonesia. Seseorang yang masih memiliki unsur ke-Tionghoa-an biarpun sangat sedikit masih dianggap sebagai orang asing. Ini terlihat dari ideologi Orba yang mengakui adanya kemajemukan masyarakat Indonesia, namun dilain sisi secara implisit rejim ini mengatakan bahwa kemajemukan hanya dapat diterima bila rejim mengatakan demikian. Perbedaan yang tidak dikehendaki oleh rejim dianggap salah dan tidak diterima. Anti Cina merupakan salah satu isu yang sering mendominasi disintegrasi sepanjang sejarah bangsa ini, khususnya setelah peristiwa G 30 S/PKI. Oleh pemerintahan Orba etnis Cina dimasukkan kedalam golongan yang tidak

⁵⁸ Parsudi Suparlan, "Kesukuan Dan Posisi Orang Tionghoa Di Indonesia", *ibid*, hal. 86

⁵⁹ Leo Suryadinata, *ibid*, hal. 67

dikehendaki merusak tatanan yang telah direncanakan oleh rejim, untuk itu mereka dikelompokkan dalam konsepsi ras.

2.2.1 Kebijakan integrasi nasional Soeharto terhadap etnis Cina

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa eksistensi etnis Cina sebagai kelompok minoritas yang memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian nasional menjadi salah satu sumber konflik yang sangat potensial di Indonesia, sehingga untuk meminimalisir disintegrasi antara mayoritas pribumi dengan minoritas etnis Cina di Indonesia menurut pemerintahan Soeharto baru dapat diselesaikan jika mereka sepenuhnya berasimilasi kedalam masyarakat Indonesia. Dalam upaya mengasimilasi masyarakat etnis Cina dengan masyarakat pribumi setidaknya ada tiga cara yang dianut berbagai pemerintah nasional di Asia Tenggara, yaitu:

- a. Politik akomodasi, dimana semua kelompok etnis menciptakan suatu rancangan kerja sambil mempertahankan identitas masing-masing. Kebijakan ini diterapkan di negara Malaysia dan Brunei.
- b. Amalgamasi, dimana dua kelompok atau lebih bersatu untuk membentuk kelompok lebih besar. Thailand dan Filipina mempraktekkan kebijakan tersebut.
- c. Inkorporasi, dimana suatu kelompok etnis menganut identitas kelompok etnis lainnya yang biasanya lebih besar atau mayoritas.⁶⁰

⁶⁰ A. Dahana, *op.cit*, hal.164

Menurut Leo, dari semua negara Asia Tenggara Indonesia menganut cara asimilasi inkorporasi radikal⁶¹ dimana Orba mengasimilasi masyarakat minoritas etnis Cina kedalam masyarakat mayoritas pribumi dengan melenyapkan tiga pendukung identitas Cina seperti sekolah, media bahasa dan perkumpulan Cina yang merupakan rantai penghubung antara etnis Cina yang ada di Indonesia dengan masyarakat Cina di negeri-leluhurnya. Selain itu berbagai kebijakanpun dikeluarkan untuk mendukung proses tersebut. Proses asimilasi tersebut tanggal 12 Mei 1966 didukung oleh LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa) melalui Surat Edaran, yang mencantumkan bahwa:

Orang asing harus dieksklusifkan, sedangkan warga negara keturunan asing harus diasimilasikan. Jumlah orang asing di Indonesia harus dikurangi menjadi sekecil mungkin⁶².

Ditahun yang sama untuk menerapkan proses asimilasi terhadap etnis Cina, pemerintah menerbitkan Resolusi MPRS No. III/Res/MPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa. Pasal 4 resolusi ini menyatakan “merealisasi dengan konsekuensi larangan perangkapan kewarganegaraan dan mempercepat proses integrasi melalui asimilasi warga negara keturunan asing dengan menghapus segala hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak harmonis dengan warga negara asli”⁶³.

⁶¹ *ibid*

⁶² Charles A. Coppel, *op.cit.*, hal. 94

⁶³ Irianto Subiakto, *op.cit.*, hal. 18

Dan pada tahun 1967 pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres RI No. 240 tahun 1967 mengenai kebijakan pokok yang menyangkut WNI keturunan asing. Keppres ini terdiri dari 3 bab dan 8 pasal yang isinya antara lain:

- Bab I menetapkan mengenai kedudukan WNI keturunan asing dimana kedudukan WNI keturunan asing adalah sama dalam bidang hukum dan pemerintahan serta tidak berbeda dalam hal hak dan kewajiban dengan bangsa Indonesia.
- Bab II mengenai pembinaan WNI keturunan asing yaitu melalui asimilasi dengan jalan meniadakan perbedaan perlakuan antara WNI keturunan asing dan WNI asli, mengganti nama-nama Cina dengan nama Indonesia dan diberi kesempatan untuk menyerahkan daya dan dananya disegala bidang demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.
- Bab III mengenai pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pokok dibebankan pada materi dalam negeri dan keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan yaitu 6 Desember 1967⁶⁴.

Menindaklanjuti Piagam Asimilasi yang pernah dikeluarkan pemerintahan Orba tahun 1961, pemerintah Indonesia mengeluarkan GBHN sejak tahun 1978 sampai 1988. Dibawah ini diperinci dari masing-masing GBHN

⁶⁴ Dikutip dalam Lie Tek Tjeng, *Masalah WNI Dan Masalah Huakiau Di Indonesia*, Lembaga Research Kebudayaan Indonesia, LIPI, Jakarta, 1971, hal. 52

GBHN Tap/MPR No. IV/1978, menyatakan “usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan disegala bidang kehidupan dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa”.

GBHN Tap/MPR No. II/1983, menyatakan “usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan disegala bidang kehidupan baik dibidang ekonomi maupun sosial budaya, dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional”.

GBHN Tap/MPR No. IV/1988, menyatakan “usaha-usaha pembauran bangsa perlu dilanjutkan disegala bidang kehidupan baik dibidang ekonomi maupun sosial budaya, dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional”⁶⁵.

Dicanangkannya program asimilasi sebagai kebijakan menggugurkan paham integrasionis yang menghendaki diakuinya etnis Cina sebagai maupun suku bangsa yang baru di Indonesia. Asimilasi bertujuan meleburkan etnis Cina menjadi satu kesatuan *nation*. Anjuran diadakannya asimilasi cukup berhasil walau sebagian, ini terlihat dari adanya kecenderungan menghilangnya bahasa Cina dikalangan masyarakat Cina yang berusia dibawah 40 tahun. Kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah untuk mengasimilasi etnis Cina, yaitu:

- a. Desember 1966 dikeluarkan aturan bagi etnis Cina untuk tidak menggunakan nama Tionghoa mereka. Surat kabar berbahasa Mandarin

dilarang terbit⁶⁶, penggunaan bahasa Mandarin atau dialek Tionghoa lainnya didepan publik juga tidak dianjurkan. Film-film produksi Hongkong dan Taiwan dilarang beredar.⁶⁷

- b. Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. 6/1967, yang menegaskan bahwa istilah Tionghoa dan Tiongkok harus diganti dengan istilah Cina⁶⁸ untuk menghilangkan rasa superioritas etnis ini.
- c. Instruksi Presidin Kabinet RI No. 37/U/IN/12/1967 tentang kebijakan pokok penyelesaian masalah Cina yang wujudnya dibentuk dalam BKMC
- d. Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. 127/U/Kep/12/1966 tentang kebijakan pokok WNI keturunan asing melalui proses asimilasi terutama untuk mencegah terjadinya eksklusif rasial serta adanya anjuran supaya WNI keturunan asing yang masih menggunakan nama Cina diganti dengan nama Indonesia⁶⁹. Hal ini dimaksudkan supaya seorang WNI keturunan Cina akan memperkuat rasa persatuannya dengan Indonesia, sehingga dapat diterima sebagai warga Indonesia seutuhnya untuk menghambat eksklusivisme rasial. Kebijakan tersebut

⁶⁵ *ibid*, hal. 53

⁶⁶ Kecuali surat kabar "Yindunxiya Ribao / Harian Indonesia", sebuah harian pemerintah yang terbit di Jakarta, berjumlah 8 halaman. 4 halaman dalam bahasa Cina dan sisanya dalam bahasa Indoensia. Halaman-halamannya banyak memuat iklan dan berita tentang kebijakan pemerintah Indonesia.

⁶⁷ Mona Lohanda, , *op.cit*, hal. 69

⁶⁸ E. Shobirin Nadj, "Problematika Segresi Sosial Dan Upaya Membangun Politik Kewarganegaraan", dalam Andreas Pardede, *ibid*, hal. 113

⁶⁹ Yusiu Liem, *op.cit*, hal. 21

merupakan tindakan identifikasi umum untuk membedakan secara jelas antara orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia dengan yang asing. Tetapi Tionghoa yang berwarga negara asing tidak boleh mengganti namanya.

- e. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang tempat-tempat yang disediakan untuk anak-anak WNA Cina disekolah-sekolah nasional sebanyak 40% dan setiap kelas jumlah WNI harus lebih banyak daripada murid WNA Cina.
- f. Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 perihal pelarangan agama, kepercayaan dan adat istiadat etnis Cina. Karena itu penyelenggaraan upacara adat etnis Cina tidak dianjurkan dengan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan proses asimilasi yang sedang dijalankan pemerintah. Perayaan Tahun Baru Imlek diperbolehkan hanya dalam lingkungan keluarga, sedangkan perayaan Cap gomeh dan Pehcun sama sekali tidak diijinkan.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 455.2-360/1968 tentang penataan kelenteng-kelenteng di Indonesia.⁷⁰
- h. Perda Dati I DKI JKT-1/OS-II/OS-12, memberikan kode tertentu pada KTP orang-orang keturunan Cina sehingga identitas sebagai keturunan asing tetap bisa dilacak.

⁷⁰ *ibid*

- i. Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 02 / SE / Ditjen / PPG / K / 1988 tentang larangan penerbitan dan pencetakan tulisan / iklan beraksen dan berbahasa Cina⁷¹.

Dari berbagai kebijaksanaan tersebut pemerintahan rejim Soeharto berharap kerukunan serta integrasi antar etnis, khususnya pribumi dan etnis Cina dapat tercipta. Walau pada kenyataannya pemerintah tetap menanamkan perbedaan dalam diri orang-orang etnis Cina. Seperti pemberian no. KTP etnis Cina yang dibedakan, jumlah mereka yang dibatasi untuk masuk universitas negeri, tidak menggalakkan orang etnis Cina ke sektor pemerintahan dan dibatasi ruang gerak mereka di bidang ekonomi.

⁷¹ *ibid*, hal. 68



BAB III

BERKEMBANGNYA POTENSI KONFLIK ANTI ETNIS CINA

3.1 Kebijakan ekonomi pemerintah terhadap etnis Cina

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses meningkatkan pendapatan perkapita dari penduduk / masyarakat suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya.

Pembangunan ekonomi bukan hanya sekedar peningkatan dalam pertumbuhan GNP (*Gross National Product*) per kapita sebagai indek dari pembangunan saja, tetapi pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang merupakan reorganisasi dari pembaharuan yang menyeluruh dari adanya sistem dan aktivitas perekonomian dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam usaha untuk mencapai sasaran dalam pembangunan perlu adanya suatu strategi. Franklyn Lisk menggolongkan strategi pembangunan menjadi 4 kategori utama:

1. Strategi konvensional yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi
2. Strategi yang berorientasi dan menekankan pada kesempatan kerja
3. Strategi yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan
4. Strategi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar⁷²

⁷² Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 22

Dari ke-4 strategi pembangunan tersebut, pembangunan nasional rejim Soeharto memprioritaskan pembangunannya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan asumsi dasar bahwa manakala sukses dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi diharapkan dapat merangsang dan melimpah ke bidang-bidang lain. Untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 7% setahun, selama Pelita VI pemerintah membutuhkan investasi 815 triliun rupiah (dulu waktu dicanangkan pada 1993 ditargetkan 660 triliun rupiah) dari jumlah tersebut pemerintah hanya sanggup mensuplai kurang dari 30%-nya sedangkan sisanya diharapkan dari swasta dan dana masyarakat (tabungan, deposito, obligasi, saham, dsb)⁷³

Strategi pertumbuhan ekonomi Orba-pun cenderung bersifat pasar bebas dan cenderung kapitalis dengan mengusahakan penanaman modal asing dari negara-negara Barat, Jepang dan etnis Cina sebagai pemegang sebagian modal asing di Indonesia. Kebijakan ekonomi pintu terbuka ini memperkuat kedudukan ekonomi non pribumi yang konon 70% dikuasai pedagang etnis Cina. Pemerintah Orba menganggap bahwa para kapitalis Cina dengan modal yang dimilikinya merupakan patner yang paling sesuai menunjang pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadi fokus utama dalam program pemerintah. Para kapitalis Cina ini merupakan akses untuk menarik investor asing yang dapat mengembangkan usahanya dan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Kebijakan rezim Soeharto untuk membatasi etnis Cina dibidang ekonomi merupakan keputusan yang dibuat pada

⁷³ AndrinoChaniago, *op.cit*, hal. 260

Digital Repository Universitas Jember

seminar Angkatan Darat yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1966⁷⁴, dimana ditetapkan bahwa orang Tionghoa harus dicegah masuk ke bidang lain terutama bidang politik karena pemimpin militer tidak percaya kepada orang peranakan Cina sebagai sebuah kelompok.

Elite yang berkuasa beranggapan, bahwa pemerintah bisa dengan mudah menguasai minoritas peranakan Cina bila mereka dibatasi di bidang ekonomi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia bisa berkembang pesat.

Tanggal 1 Januari 1967 pemerintah mengeluarkan suatu Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa⁷⁵ "...modal asing hendaknya digunakan semaksimal mungkin untuk mempercepat laju pembangunan ekonomi Indonesia dan (hendaknya) dipergunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor dimana investasi modal asing Indonesia tidak atau belum dapat diselesaikan dalam waktu singkat ". UU tersebut diberlakukan dengan maksud untuk membuka perekonomian Indonesia dan menggiatkan kembali usaha swasta. Selain itu UU PMA juga ditujukan untuk menarik minat para investor asing, agar mereka berminat menanamkan modalnya di Indonesia hingga akhirnya uu tersebut memberikan perlakuan istimewa bagi para investor asing. Contoh perlakuan istimewa tersebut adalah bagi orang asing yang mau menanamkan modal minimal US\$ 2,5 juta ia akan

⁷⁴ Leo Suryadinata, *op.cit*, hal. 92-93

⁷⁵ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Grafiti Press, Jakarta, 1984, hal. 145

dibebaskan dari pembayaran pajak dalam 2 tahun dan tidak dikenakan pembatasan untuk transfer dan deviden⁷⁶.

UU No. 1 / 1967 itu ditindaklanjuti dengan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juli 1968⁷⁷. Dalam UU PMDN itu dinyatakan bahwa “modal asing dalam negeri memiliki status yang sama dengan modal nasional (milik WNI) dan modal negara yang disebut dengan modal dalam negeri”⁷⁸. Dengan status yang sama itu modal milik etnis Cina ternyata mendapat perlakuan berbeda dengan modal WNI dan bahkan diberi keringanan serta pembebasan pajak. Pemerintah juga menganjurkan WNA Cina mengadakan *joint venture* dengan perusahaan swasta nasional maupun pemerintah sehingga perusahaannya dikategorikan sebagai perusahaan nasional dan tidak diberikan batasan waktu untuk beroperasi sebagaimana perusahaan asing. Tetapi sebenarnya pembatasan waktu untuk beroperasi, dapat diatasi bila pengusaha etnis Cina tersebut mengajukan proses naturalisasi. Dengan UU PMDN ini pemerintah Orba menaruh harapan kepada etnis Cina untuk dapat berperan aktif menunjang program pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada para pengusaha etnis Cina.

Makin dominannya Jepang sebagai investor asing dan juga keberpihakan rejim ekonomi kepada pengusaha-pengusaha etnis Cina memicu kerusuhan Malari (Malapetaka 15 Januari) pada tanggal 15 Januari 1974. Kerusuhan tersebut

⁷⁶ *ibid*

⁷⁷ *ibid*, hal. 56

merupakan salah satu bukti bahwa kebijakan ekonomi rejim Soeharto sejak tahun 1967-1974 pelaksanaannya kurang berhasil.

Dengan terjadinya kerusuhan Malari, pemerintah kemudian berupaya untuk melindungi para pengusaha pribumi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan pengusaha pribumi melalui pembentukan Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usaha Kecil (KUK) yang hanya diberikan kepada pengusaha pribumi melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. SE.6/37/UPK tentang kredit investasi untuk golongan pengusaha kecil atau kredit investasi kecil⁷⁹. Paket kredit tersebut menurut Rachmat Saleh Gubernur BI “dikeluarkan tanpa memandang kapasitas pengusaha besar atau kecil, pribumi harus mendapatkan paket kredit”⁸⁰. Dan untuk pengusaha Indonesia peranakan Cina baik kaya maupun miskin tidak diperbolehkan mengambil paket kredit tersebut.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengenai pengalihan saham milik asing ke tangan pribumi melalui Instruksi Presiden RI No. 10 tahun 1968 tentang pengawasan terhadap kegiatan warga asing yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia⁸¹. Dampak dikeluarkannya kebijakan ini adalah penutupan sektor perdagangan bagi investor asing dan secara tidak langsung memaksa pengusaha etnis Cina untuk mengalihkan usahanya ke sektor industri.

⁷⁸ *ibid*

⁷⁹ Andreas Pardede, *op.cit*, hal. 199

⁸⁰ *ibid*, hal. 164

⁸¹ *ibid*

Akhirnya pada tahun 1973 pemerintah mengeluarkan Keppres no. 14 tahun 1979 yang disempurnakan menjadi Keppres no. 14 A/1980 dan Keppres No. 18/1981⁸² tentang kewajiban semua lembaga pemerintah dan kementerian memberikan keistimewaan kepada pedagang dan kontraktor pribumi⁸³. Dan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi, pada Maret 1990 pemerintah mewajibkan kepada para konglomerat keturunan Cina untuk menjual sahamnya sekitar 1% sampai 25% kepada koperasi, sektor yang dikuasai pribumi⁸⁴ untuk menciptakan suatu kemitraan bisnis antara keduanya.

Diterapkannya Keppres 14/1979 itu ternyata selain membawa dampak positif juga dampak negatif. Dampak positif yang terlihat adalah keberhasilan Keppres dalam mencetak pengusaha-pengusaha pribumi handal, terutama yang bergerak disektor konstruksi dalam rangka mengembangkan infrastruktur. Mereka itu antara lain adalah Siswono Yudo Husodo, putra mantan Gubernur Jakarta Suwondo; Fahmi Idris, mantan aktivis mahasiswa angkatan 1966 dan Pontjo Sutowo, putra Dirut Pertamina Ibnu Sutowo. Mereka semua tergabung dalam HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Walaupun Keppres tersebut dalam aplikasinya mencetak pengusaha-pengusaha pribumi namun mayoritas kepemilikan sektor swasta masih dipegang oleh pengusaha-pengusaha keturunan Cina. Hal tersebut disebabkan

⁸² Leo Suryadinata, *op.cit*, hal. 91

⁸³ Untuk proyek besar usaha patungan antara pribumi dan nonpri digalakkan, akan tetapi pribumi harus memiliki andil 50% dan harus aktif dalam perusahaan tersebut. Karena kurangnya informasi, jadi tidak diketahui beberapa pedagang pribumi yang telah mendapatkan kauntungan dari peraturan baru itu. Namun yang kentara adalah banyak non pri yang telah memperoleh mitra pribumi. Jadi peraturan ini tidak mengubah situasi yang sudah ada.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 61

aturan-aturan yang ada dalam Keppres hanya membantu sebagian kecil dari pengusaha pribumi, terutama mereka yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan atau memiliki aliansi dengan pengusaha etnis Cina.

Akhir tahun 1990-an pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan deregulasi dibidang finansial. Kebijakan ini dikenal dengan Paket Oktober 1988 (Pakto 1988)⁸⁵. Dikeluarkannya Pakto 1988 semakin membuka kesempatan kepada etnis Cina untuk memperkuat usahanya dengan mengkonsentrasikan kekuatan finansialnya melalui pendirian beberapa instansi dan kerjasama antara pengusaha etnis Cina dengan institusi finansial asing. Dengan adanya kerjasama tersebut maka pengusaha etnis Cina akan semakin mudah untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri sehingga kesejahteraan para pengusaha etnis Cina akan semakin meningkat.

Kebijakan pembangunan diatas, bisa dikatakan telah menciptakan adikuasa-adikuasa ekonomi dan persaingan bebas yang mengakibatkan penindasan dari kelompok kuat terhadap kelompok lemah, kecemburuan sosial dan ketimpangan pendapatan yang tinggi diantara kelompok-kelompok pendapatan di masyarakat. Akhirnya berbagai kebijakan penyelenggaraan negara, khususnya dengan ditetapkannya sistem yang sentralistis dan menolak prinsip kerakyatan telah mematikan semangat rakyat pada umumnya dan rakyat daerah pada khususnya untuk percaya pada diri sendiri dan mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri dalam

⁸⁵ Pakto 1988 ini mendorong timbulnya perubahan mendasar disektor keuangan, khususnya perbankan. Isi kebijakan itu diantaranya pengaturan kembali batasan peminjaman (*legal bending limit*), penghapusan hambatan pendirian bank, keleluasaan mendirikan kantor-kantor cabang dan

upaya memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan selanjutnya kebijaksanaan yang terpusat dan represif itu telah menciptakan rasa suka dan tidak suka diantara rakyat serta menimbulkan potensi konflik dan perpecahan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

3.2 Implikasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan

Potensi konflik yang muncul kemudian merupakan bentuk dari pembangunan yang tidak mengindahkan aspek keadilan, dan pada akhirnya justru melahirkan resiko konflik yang sangat rawan bagi negara yang tingkat keragamannya ekonomi, sosial maupun kultural (etnis-agama) tinggi. Ketidakadilan tersebut akan menentukan cara masyarakat memandang diri mereka sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, konflik tidak dengan mudah terjadi sekalipun tersedia faktor-faktor pemicu lainnya kecuali bila ada ketimpangan.

3. 2.1 Kesenjangan ekonomi antara etnis Cina dengan pribumi

Trilogi pembangunan⁸⁶ sebagai prinsip pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orba yang dirumuskan sebagai sasaran untuk mewujudkan tujuan negara telah mampu meningkatkan GDP Indonesia yang selama masa Sukarno mengalami kehancuran⁸⁷. Namun kiranya prinsip pemerataan dan keadilan sosial

penurunan rasio cabang wajib minimum menjadi 2% dari 15%, lihat Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa, op.cit*, hal.69.

⁸⁶Terdiri dari 3 prinsip, yaitu pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju pada penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

⁸⁷Hancurnya perekonomian Indonesia terlihat dari menumpuknya hutang LN hingga mencapai US\$ 2400 juta, laju inflasi yang mencapai 20%-30% sebulan, infrastruktur yang berantakan, kapasitas

dikesampingkan dan kurang diperhatikan akan menimbulkan masalah oleh Soeharto. Masalah kesenjangan antara etnis Cina dengan pribumi misalnya.

Jumlah etnik Cina Indonesia yang diperkirakan sekitar 8 juta orang atau kalau diasumsikan penduduk Indonesia yang 200 juta jumlah mereka sekitar 4% dari seluruh penduduk Indonesia, berperan sangat besar dalam kegiatan ekonomi di negeri ini. Menurut perkiraan sekitar 50% dari kegiatan dan peredaran uang dikuasai mereka. Dari 12.657 perusahaan yang dimiliki konglomerat pri dan non pri, 9.347 buah atau sekitar 74% dimiliki konglomerat etnis Cina. Sedangkan dari total aset diperkirakan sekitar US \$ 32.372.000.000, US \$ 25.887.000 atau kurang lebih 80% dikuasainya⁸⁸. Keadaan ini menimbulkan dampak pada aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan menurut Didik Rachbini, bahwa “untuk tahun 1993 yang lalu, sekitar 1% penduduk memperoleh 80% pendapatan nasional sedangkan 99% penduduk ditingkat bawah hanya menerima 20% saja”⁸⁹.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran masyarakat, ternyata sebanyak 20% penduduk golongan atas menguasai lebih dari 40% pangsa pengeluaran nasional sementara 40% penduduk yang berada digolongan bawah hanya menguasai porsi 20% dari total pengeluaran nasional. Gambaran ketimpangan ini semakin tampak ketika melihat perkembangan porsi pengeluaran penduduk golongan pengeluaran menengah yang penguasaannya atas porsi pengeluaran nasional menurun dari tahun

produksi sektor-sektor industri dan ekspor yang merosot, pengawasan anggaran serta penarikan pajak yang sudah tidak berjalan lagi. Untuk gambaran lebih lanjut, lihat pernyataan Sultan Hamengku Buwono IX pada bulan April 1996 dalam Yahya Muhaimin, *op.cit*, hal. 51

⁸⁸ *Info Bisnis*, 14 Januari 1997

ke tahun, sementara porsi pengeluaran masyarakat golongan atas yang jumlahnya 20% dari total jumlah penduduk tadi terus pula meningkat. Pada tahun 1990-an masyarakat dengan golongan pengeluaran menengah yang jumlahnya 40% dari total jumlah penduduk, masih menguasai 36,67% dari total pengeluaran penduduk secara nasional. Tetapi pada 1996 porsi pengeluaran nasional yang dikuasai kelompok ini sudah turun menjadi 35,1 % (lihat tabel).

Tabel 2 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Tahun
1980-1996

Tahun	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi
1980	19,55	38,19	42,26
1981	20,44	37,46	42,10
1984	20,75	37,28	41,97
1987	20,87	37,48	41,65
1990	21,30	36,70	41,90
1993	20,30	36,90	42,80
1996	20,20	35,10	44,90

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik 1998, hal. 29

Kesenjangan yang terjadi kemudian dikontraskan dengan keadaan penduduk pribumi yang masih miskin, bersedak-sesak dilingkungan kumuh dan makan seadanya, kebalikan dengan penduduk etnis Cina.

Usaha pemerintah dengan mendirikan koperasi sebagai jalan untuk membantu pengusaha pribumi pada kenyataannya tidak diperhatikan keberadaannya oleh penguasa. Keberadaan koperasi yang cukup potensial diabaikan karena kurang dapat menyumbang kelangsungan hidup perekonomian Indonesia. Memang tak bisa dipungkiri bahwa sektor koperasi yang notabene kekurangan modal tidak pernah

⁸⁹ *Republika*, 19 Juli 1993

mendapatkan kucuran dana maupun kredit dari perbankan, walau secara riil sektor ini dapat meningkatkan kehidupan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Penggambaran ini makin memperluas kecemburuan sosial dan mempertajam jarak sosial antara kedua etnis tersebut.

3.2.2 Eksklusivisme etnis Cina

Ke-eksklusif-an etnis Cina mulai terbentuk setelah pemerintah penjajah Belanda memisahkan warga Indonesia kedalam klas-klas sosial, dengan etnis Cina masuk peringkat kedua dibawah orang Eropa sebagai kelompok klas satu.

Penggolongan penduduk berdasarkan keturunan ini telah memperkuat perasaan segolongan dan membuat mereka enggan berasimilasi dengan pribumi, karena menurut mereka asimilasi akan menurunkan status sosial dan bahkan karenanya mereka akan kehilangan hak istimewa dalam hukum⁹⁰

Golongan etnis Cina lebih mempererat tali pengikat antara golongan keturunan mereka sendiri daripada dengan golongan lain. Kebudayaan negeri leluhur mereka semakin kental dalam tubuh masyarakat etnis Cina, karena mereka dilarang membaur dengan kelompok pribumi selain berdagang.

Struktur kekeluargaan yang bersifat "extended family" dari keturunan ayah, mewarnai kehidupan sosial baik sosio-psikologis, sosio-politis dan sosio-budaya masyarakat etnis Cina.⁹¹ Ikatan keluarga ini memegang peranan penting bagaimana seharusnya tiap-tiap anggota keluarga bersikap terhadap lingkungan luarnya.

⁹⁰ Charles A. Coppel, *op.cit*, hal. 38

⁹¹ Hidayat Z.M, *op.cit*, hal.141



Kerjasama, pola hidup tunduk, taat dan patuh terhadap keluarga serta sifat hemat dan rajin membiasakan mereka untuk saling bantu dalam lingkungannya sendiri. Dengan dasar kepercayaan akan kepentingan kesatuan mereka berusaha menghindari segala kemungkinan persaingan ke dalam dan lebih kompak dalam menghadapi persaingan dari luar.

Sifat khas inilah yang menolong mereka dalam perkembangan sejarah Indonesia lebih menonjol dalam bidang ekonomi. Apalagi dalam perkembangan sejarah Indonesia mereka dijadikan alat Belanda dalam melaksanakan keinginannya, sehingga mereka lebih banyak terpengaruh oleh sikap mental usaha Belanda daripada pribumi. Dengan demikian mereka merasa lebih dekat dengan orang Barat daripada dengan pribumi. Mereka merasa lebih tinggi dalam ekonomi, agama dan dalam ilmu pengetahuan daripada penduduk pribumi. Hal inilah yang merenggangkan dan membentuk pola hidup eksklusif orang Cina.

Sebagai akibatnya sikap hidup dalam pergaulan dengan penduduk pribumi kaku dan tidak harmonis. Selain itu adanya kecenderungan untuk hidup dengan menciptakan komunitas sendiri dan seakan menutup diri dari kelompok atau entitas lain menimbulkan kecurigaan dan anggapan-anggapan bahwa mereka adalah bangsa yang suka menyendiri, tak suka bersosialisasi, dan lain-lain.

3.2.3 Perlindungan pemerintah terhadap konglomerat Cina

Pola pembangunan gaya militer Orba telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi dengan model pemberian hak-hak istimewa kepada para pengusaha kelas atas, yang menurut Didik Rachbini “menimbulkan ketidakpuasan masyarakat

terhadap perencanaan, proses dan penggunaan hasil. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses politik dan ekonomi, mereka dipandang hanya sebagai obyek pembangunan⁹². Tak bisa dipungkiri kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah menempatkan etnis Cina pada posisi dominan yang selalu berhadapan dengan masyarakat lokal (pribumi). Walaupun orang-orang yang dipakai oleh rejim bukan mewakili kebanyakan dari etnis Cina. Mereka tidak punya pilihan karena dalam menentukan profesi, mereka dibatasi ruang geraknya. Kebijakan penguasa di bidang ekonomi tidak lepas dari kebijakan mereka di bidang politik. Hal ini merupakan satu paket dalam rangka menjaga kepentingan Soeharto. Disatu sisi, politik penguasa membatasi partisipasi mereka tapi disisi lain mereka dianakemaskan. Kesemuanya ini dilakukan atas nama asimilasi.

Sikap pemerintah yang ambivalen ini disebabkan kondisi situasional yang berkembang dalam kurun waktu tertentu. Rezim Soeharto selalu ingin mempertahankan hegemoni politiknya. Mereka beranggapan bahwa etnis Cina sebagai kelompok minoritas tidak akan mengganggu hegemoni politik mereka, beda dengan kelompok mayoritas pribumi. Sebab bila pribumi memiliki kekuatan ekonomi, potensial untuk mengganggu hegemoni politik Soeharto akan muncul bahkan dapat membangun basis massa demi kepentingan politik mereka.

⁹² Zaim Saidi, *Soeharto Menjaring Matahari: Tarik Ulur Reformasi Ekonomi Orba Pasca 1980*, Mizan, Bandung, 1998, hal. 119

Sudut pandang Soeharto tersebut dipengaruhi dengan fenomena pertumbuhan kapitalis domestik Indonesia, yang menurut Ian Chalmers mengalami tiga gejala pertumbuhan ekonomi, diantaranya:

1. adanya swastanisasi perusahaan-perusahaan negara
2. tumbuhnya kelompok-kelompok bisnis utama dalam bentuk konglomerat domestik
3. keterlibatan PPP (putra-putri presiden) Soeharto dalam aktivitas bisnis swasta.⁹³

Kecenderungan ini terjadi menyusul dikeluarkannya tiga kebijakan pemerintah, yaitu **pertama** arah kebijakan yang menekankan pada deregulasi dan debirokratisasi, **kedua** kebijakan berorientasi ekspor, dan **ketiga** melanjutkan deregulasi sektor jasa dan perbankan sehingga mempertinggi daya saing pihak swasta menghadapi pihak asing.

Sejak awal 1980-an pemerintah beranggapan bahwa untuk menghadapi liberalisasi pasar, diperlukan pelaku ekonomi yang tangguh dan mampu bersaing di dunia internasional. Tampaknya dengan alasan itulah kredit puluhan triliun rupiah mengucur hanya kepada sekelompok konglomerat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah terlalu mudah memberikan hak-hak istimewa kepada para pengusaha swasta tertentu. Dengan kewenangan besarnya dalam mengarahkan dan mengatur hubungan ekonomi dengan maksud untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi justru membiarkan saja terbentuk dan berkembangnya hubungan patron

⁹³ Ian Chalmers, *Indonesia in 1990: Democratization and Social Forces, Southeast Asian Affairs*, Singapore, 1991

klien antara pihak-pihak swasta dengan elite-elite birokrasi, baik yang dibangun atas dasar hubungan balas jasa maupun karena ikatan-ikatan kekerabatan dan pribadi dengan kalangan swasta tertentu.

Melalui hubungan-hubungan khusus dengan para elite politik dalam pemerintah, beberapa pengusaha berhasil memperoleh banyak kemudahan dalam mendirikan dan mengembangkan usaha mereka. Contoh kasus Sukamdani Sahid Gitosardjono⁹⁴, seorang pengusaha yang karena hubungan kekerabatannya dengan keluarga presiden, khususnya dari kekerabatan Mangkunegaran Solo, dimana ibu Tien Soeharto menjadi anggota dari kekerabatan itu, memperoleh hak istimewa seperti hak konsesi untuk pengadaan benih, pupuk dan pestisida untuk areal persawahan di Jawa Tengah, padahal pengalaman dan pengetahuan Sukamdani di bidang ini dinilai sangat minim.

Dilihat dari investasi swasta dan negara di Indonesia pada tahun 1967-1980 (dalam persen) terlihat bahwa selain investasi negara, investasi swasta nonpribumi lebih besar dibandingkan dengan pribumi.

Tabel 3 Investasi Swasta Dan Negara Di Indonesia Tahun 1967-1980
(dalam persen)

Investasi Negara	58,75
Investasi Swasta Nonpribumi	29,95
Investasi Swasta Pribumi	11,20
Lain-lain	3,10

Sumber: Arief Budiman, "Sejarah Gagalnya Pembangunan Orba", dalam Andrinof A. Chaniago, Jakarta, LP3ES, 2002, hal. 41.

⁹⁴ Yahya Muhaimin, *Bisnis Dan Politik Di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1993, hal. 249-250

Data tahun 1994 menunjukkan terdapat sekitar 300 kelompok bisnis yang masuk kategori konglomerat dengan jumlah 4.165 perusahaan yang tergantung didalamnya. Konglomerat bisnis ini memiliki aset senilai kurang dari US\$ 50 juta – US\$ 700 juta, yang kalau dijumlahkan seluruhnya adalah senilai US\$ 18.580,4 juta (aset tersebut terlihat dalam tabel).

Tabel 4 Kelompok-Kelompok Bisnis Pribumi Dan Non Pribumi Menurut Aset (dalam juta rupiah)

Interval Modal	Non Pribumi	Pribumi	Total
- 49	102 (34,00%)	53 (17,6%)	149 (51,67%)
50 – 100	36 (12,00%)	12 (4,00%)	48 (16,00%)
101 – 150	22 (7,33%)	2 (0,6%)	24 (8,00%)
151 – 200	7 (2,33%)	6 (2,00%)	13 (4,33%)
- 201 keatas	12 (4,00%)	1 (0,33%)	13 (4,33%)
Total	226 (76,00%)	72 (24,00%)	300 (100,0%)

Sumber : Kompas, 13 Agustus 1995

Data diatas diperkuat dengan publikasi PDBI tahun 1995, yang menganalisa fenomena pertumbuhan kelompok-kelompok bisnis swasta di masa Orba yang menjelaskan keterkaitan antara negara dan gejala pertumbuhan sebuah kapitalisme dan konglomerat domestik sebagai berikut:

1. 300 konglomerat yang terdiri dari 10 konglomerat tingkat atas dan sisanya konglomerat menengah dan bawah.

2. Dari 300 itu dibagi atas 14 kroni kapitalisme, 22 birokratik kapitalisme dengan asset 14 triliyun rupiah.
3. Salim Group yang termasuk konglomerat tingkat atas mempunyai asset 4 triliyun rupiah (55% dari GDP)
4. Sedangkan data aktual BPS (Biro Pusat Statistik) maupun Bank Dunia menunjukkan bahwa besarnya angka penjualan dari 10 konglomerat terbesar di Indonesia sudah mencapai 30 % dari PDB (Produk Domestik Bruto)⁹⁵

Kehadiran kelompok-kelompok bisnis besar dalam perekonomian nasional sebenarnya tidak secara otomatis mengakibatkan kegiatan ekonomi menjadi tidak efisien atau menghasilkan ketimpangan. Hal itu terwujud bila yang kemudian terjadi adalah kekurangan iklim persaingan sehat yang mengakibatkan inefisiensi kegiatan ekonomi dan pengkonsentrasian kepemilikan asset serta misalokasi sumber-sumber ekonomi⁹⁶. Semisal, pejabat-pejabat yang mempunyai fasilitas dan kadang uang tapi tidak memiliki pengalaman bisnis, cenderung memakai orang Cina untuk menjalankan bisnis mereka.

Mereka enggan menggunakan orang pribumi karena **pertama**, orang pribumi kurang berpengalaman dan sering kekurangan modal. **Kedua**, ada resiko politik bila bekerjasama dengan pengusaha pribumi karena biasanya mereka mempunyai hubungan yang erat dengan kepentingan politik yang dapat mengancam pejabat⁴

⁹⁵ Christianto Wibisono, *Konglomerat dan Demokrasi Ekonomi*, Seminar 50 tahun Indonesia, LIPI, Yayasan Insan Politik, Jakarta, 3-4 Oktober 1995

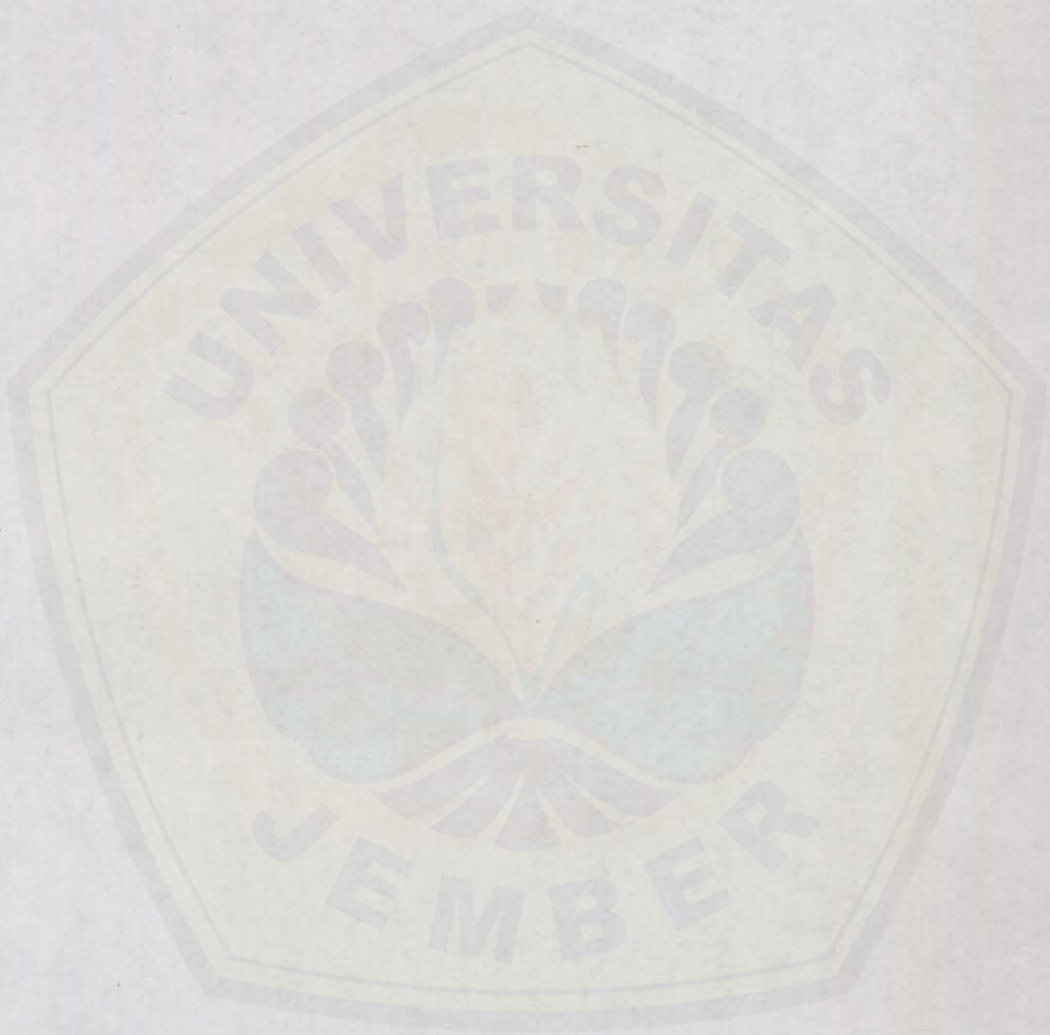
tersebut. Disamping itu mereka juga cenderung mempunyai kekuatan menawar yang lebih besar sehingga mengurangi keuntungan elite penguasa. Hal tersebut kebalikan dengan orang Cina.

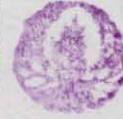
Perbedaan kemampuan antar keduanya juga menyebabkan terjadinya perbedaan dikalangan pemodal domestik dalam memanfaatkan peluang. Pemodal besar dan pengusaha yang dekat dengan penguasa dengan mudah bekerjasama dengan pemodal asing dalam melakukan kegiatan investasi. Artinya, mereka juga memperkuat integrasi ekonomi diantara sesama kapitalis Asia yang dimotori oleh para kapitalis Jepang dan NIB Asia. Sedangkan peran yang dilakukan para pengusaha bermodal kecil tidak lebih pada sektor jasa yang bersifat jangka pendek, seperti bisnis perumahan dan pengadaan tanah untuk kawasan industri.

Dilain pihak pengusaha etnis Cina bersedia berpatner dengan para pejabat / elite penguasa dikarenakan hanya dengan cara itu para pengusaha peranakan Cina ini dapat mencapai bisnis yang menguntungkan dan mendapat perlindungan. Dan karena lemahnya pengawasan kemitraan birokrasi dengan para konglomerat, model KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) kemudian menjadi alternatif untuk memperkuat posisi para oknum penguasa dan kroni-kroninya yang berada dipusat-pusat pemerintahan, baik di Jakarta maupun didaerah-daerah, melalui berbagai bentuk keistimewaan untuk kontrak, izin dan kredit sebagai imbalan atas bagian keuntungan untuk pejabat yang bersangkutan dan fasilitas untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, fisik, sosial dan bahkan kebudayaan yang ada dalam wilayah-wilayah suku bangsa.

⁹⁶ Budiono Sri Handoko, *Inefisiensi di Balik Struktur Industri Indonesia*, makalah Seminar ISEI, Surabaya, hal 20

Kedekatan konglomerat-konglomerat etnis Cina dengan oknum-oknum pemerintah tersebut pada akhirnya makin menguatkan sentimen rasial.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan:

Kedatangan masyarakat minoritas etnis Cina sejak 1293 ke Indonesia tidak membuat kelompok masyarakat ini dapat diakui seperti masyarakat etnis lainnya. Program asimilasi yang dicanangkan pemerintah untuk memperkecil perbedaan dan rasa kesukuan diantara etnis khususnya etnis Cina dengan pribumi tampaknya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kesenjangan ekonomi antara etnis Cina dengan pribumi dan eksklusivisme yang dimunculkan etnis Cina merupakan implikasi dari gagalnya program asimilasi pemerintah, membangkitkan kembali prasangka negatif terhadap etnis minoritas ini dan akhirnya menimbulkan berbagai macam bentuk kekerasan terhadapnya, yang mencapai puncaknya di Jakarta dalam kerusuhan Mei 1998. Meskipun etnis Cina sudah berusaha membaaur dengan komunitas setempat dan keberadaan mereka dalam hukum dengan etnis lain sama, perbedaan tersebut dalam kehidupan nyata masih ada.

Prasangka negatif tersebut kemudian diperparah dengan adanya krisis ekonomi pertengahan Juni 1998. Dimana krisis ekonomi tersebut merembet ke krisis politik serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Masyarakat menilai pemerintah kurang tegas dan terkesan tidak serius menanggapi masalah yang ditimbulkan karena krisis tersebut. Ketidakpuasan

masyarakat ditambah dengan adanya provokasi dari pihak-pihak yang merasa berkepentingan dalam menjatuhkan Soeharto dan menarik simpati rakyat seperti para elite partai politik, kelompok Islam kanan dan golongan militer disalurkan dengan menghakimi dan mengkambinghitamkan etnis Cina. Dan terjadilah kerusuhan Mei 1998 yang memakan banyak korban jiwa baik etnis Cina pada khususnya dan golongan pribumi.

5.2 Saran

Pemerintah dalam menerapkan kebijakannya seharusnya bisa bersikap netral supaya kasus serupa tidak akan terjadi kembali. Upaya yang bisa mereka lakukan antara lain dengan membuka peluang sebesar-besarnya kepada etnis Cina dibidang selain ekonomi. Tidak membatasi pemuda-pemudi etnis Cina yang ingin belajar di universitas negeri. Memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat pribumi dengan etnis Cina dalam segala urusan baik birokrasi, hukum, ekonomi dan lain sebagainya serta menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa sistem KKN dalam segala bentuk akan dihapuskan.

Mendidik dan memberdayakan rakyat untuk memiliki solidaritas sosial yang kuat serta memupuk semangat kebersamaan dalam pluralitas masyarakat sejak dini dalam pendidikan formal di tingkat SD sampai perguruan tinggi. Dengan membiasakan rakyat untuk saling menghargai dan menghilangkan

perasaan serta sikap “berbeda” antara kedua belah kelompok, baik pribumi / etnis Cina.

Membuka kesempatan semua pihak untuk mendorong kemajuan ekonomi secara merata dengan melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan publik. Dengan program ekonomi berpihak kepada kelompok usaha kecil dan menengah secara ekonomis, bukan berdasarkan etnisitas / sentimen rasial. Serta membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan pembangunan sehingga pembangunan berjalan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan ketersediaan sumber daya alam tanpa adanya rekayasa dari rejim penguasa.

Selain itu pemerintah juga harus dapat menghapuskan prasangka negatif terhadap etnis Cina yang sudah sejak lama dipahami oleh pribumi, dengan menjelaskan secara transparan peran serta etnis Cina ikut mempertahankan NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Arikunto, Suharsimi PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTIK,
Jakarta, Bina Aksara, 1998
- BP. Paulus, MASALAH CINA: HASIL PENELITIAN DI BEBERAPA NEGARA ASIA
DAN AUSTRALIA, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976
- Coppel, Charles A. TIONGHOA INDONESIA DALAM KRISIS, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1994
- Chaniago, Andrinof A., GAGALNYA PEMBANGUNAN: KAJIAN EKONOMI,
POLITIK TERHADAP AKAR KRISIS INDONESIA, LP3ES, Jakarta, 2001
- Diamond, Larry & Marc F. Plattener, NASIONALISME, KONFLIK ETNIK DAN
DEMOKRASI, ITB, Bandung, 1998
- Gie, The Liang, ILMU POLITIK, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 1979
....., POLITIK SUATU PEMBAHASAN TENTANG LINGKUNGAN DAN
METODOLOGI, Yogyakarta, 1969
- Hadi Sutrisno, METODOLOGI RESEARCH, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi
UGM, Yogyakarta, 1991
- Hidayat Z.M., MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN CINA INDONESIA, Tarsito,
Bandung, 1975
- Irwan, Alexander, JEJAK-JEJAK KRISIS DI ASIA TENGGARA: *EKONOMI*,
POLITIK, INDUSTRIALISASI, Kanisius, 1999

Digital Repository Universitas Jember

- Irewati, Awani, dkk, KERUSUHAN SOSIAL DI INDONESIA: STUDI KASUS KUPANG, MATARAM DAN SAMBAS, PT. Grasisndo, Jakarta, 2001
- Kleden, Ignas, MENULIS POLITIK: INDONESIA SEBAGAI UTOPIA, Buku Kompas, Jakarta, 2001
- Liem, Yusu PRASANGKA TERHADAP ETNIS CINA, Pena Klasik, Jakarta, 2000
- Muhaimin, Yahya & Colin Mac Andrew, MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN POLITIK, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1995
-, BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA, LP3ES, Jakarta, 1993
- Nasir, Moh., METODE PENELITIAN, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999
- Ndraha, Taliziduhu, PEMBANGUNAN MASYARAKAT: MEMPERSIAPKAN MASYARAKAT TINGGAL LANDAS, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Nasikun, SISTEM SOSIAL INDONESIA, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 32
- Plano. et. al., Jack C. KAMUS ANALISA POLITIK, CV. Rajawali, Jakarta, 1985
- Pardede, Andreas dkk, ANTARA PRASANGKA DAN REALITA, Pustaka Inspirasi, Jakarta, 2002
- Sa'dun M. ed, Moh. PRI DAN NON PRI: MENCARI FORMAT BARU PEMBAURAN, CIDES, Jakarta, 1999
- Subakti, Ramlan, MEMAHAMI ILMU POLITIK, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992,
- Soekanto, Soerjono dan Ratih Lestari, FUNGSIONALISME DAN TEORI KONFLIK DALAM PERKEMBANGAN SOSIOLOGI, Sinar Grafitti, Jakarta, 1988
- Sadilah, Emiliana dkk., INTEGRASI NASIONAL: SUATU PENDEKATAN BUDAYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Depdikbud, Yogyakarta, 1997

Digital Repository Universitas Jember

- Syamsudin, Nazaruddin, INTEGRASI POLITIK DI INDONESIA, Jakarta, 1988
- Surahman Winarno, DASAR-DASAR DAN TEKNIK RESEARCH, Tarsito, Bandung, 1997
- Sanit, Arbi, SISTEM POLITIK INDONESIA: KESTABILAN, PETA KEKUATAN POLITIK DAN PEMBANGUNAN, CV. Rajawali, Jakarta, 1981
- Suryadinata, Leo, DILEMA MINORITAS TIONGHOA, Grafiti Press, Jakarta, 1984
- Saidi, Zaim, SOEHARTO MENJARING MATAHARI: TARIK ULUR REFORMASI EKONOMI ORBA PASCA 1980, Mizan, Bandung, 1998
- Suryadinata, Leo, NEGARA DAN ETNIS TIONGHOA: KASUS INDONESIA, LP3ES, Jakarta, 2002
-, DILEMA MINORITAS TIONGHOA, Grafiti Press, Jakarta, 1984
- Santoso, Thomas, TEORI-TEORI KEKERASAN, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2002
- Tan, Melly G. GOLONGAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA, PT. Gramedia, Jakarta, 1979
- Tek Tjeng, Lie, MASALAH WNI DAN MASALAH HUAKIAU DI INDONESIA, Lembaga Research Kebudayaan Indonesia, LIPI, Jakarta, 1971

Makalah/Jurnal:

- Chalmers, Ian, Indonesia In 1990: Democratization And Social Forces, Southeast Asian Affair, Singapore, 1991
- Gunadi Brata, Aloysius, Konflik di Masa Krisis: Studi Empiris Determinasi Ketidakadilan Sosial-Ekonomi, Analisa CSIS No. 3 Tahun XXXI / 2002
- Kusuma, Indradi, Diskriminasi Dalam Praktek, DPP-FKKB, Jakarta, 2002

Digital Repository Universitas Jember

Setiono, Benny G, Etnis Tionghoa Adalah Bagian Integral Bangsa Indonesia, disampaikan pada diskusi akbar yang diselenggarakan Perhimpunan INTI Jakarta, tanggal 27 April 2002

Purwoatmoko, Sunardi, "Beberapa Faktor yang Menyebabkan Krisis Ekonomi Indonesia dan Upaya Pemecahannya".

Wibisono, Christianto, Konglomerat dan Demokrasi Ekonomi, Seminar 50 tahun Indonesia, LIPI, Yayasan Insan Politik, Jakarta, 3-4 Oktober 1995

Sri Handoko, Budiono, Inefisiensi di Balik Struktur Industri Indonesia, Makalah Seminar ISEI, Surabaya, 23 November 1993

Surat Kabar dan Majalah :

Business News, 20 Mei 1998

D & R No. 5, 1 Agustus 1998

Info Bisnis, 12 Agustus 1994

Info Bisnis, 14 Januari 1997

Kompas, 13 Mei 1998

Kompas, 14 Mei 1998

Kompas, 15 Mei 1998

Kompas, 12 Juni 1998.

Kompas, 15 Juni 1998

Media Indonesia, 15 Maret 1999

Prisma, 4 April 1998

Properti, Juli 1999

Digital Repository Universitas Jember

Republika, 19 Juli 1993

Republika, 30 Oktober 1997

The Sunday Times 17 Mei 1998

Warta Ekonomi, 8 Maret 1994

Warta Ekonomi, 31 Januari 1997

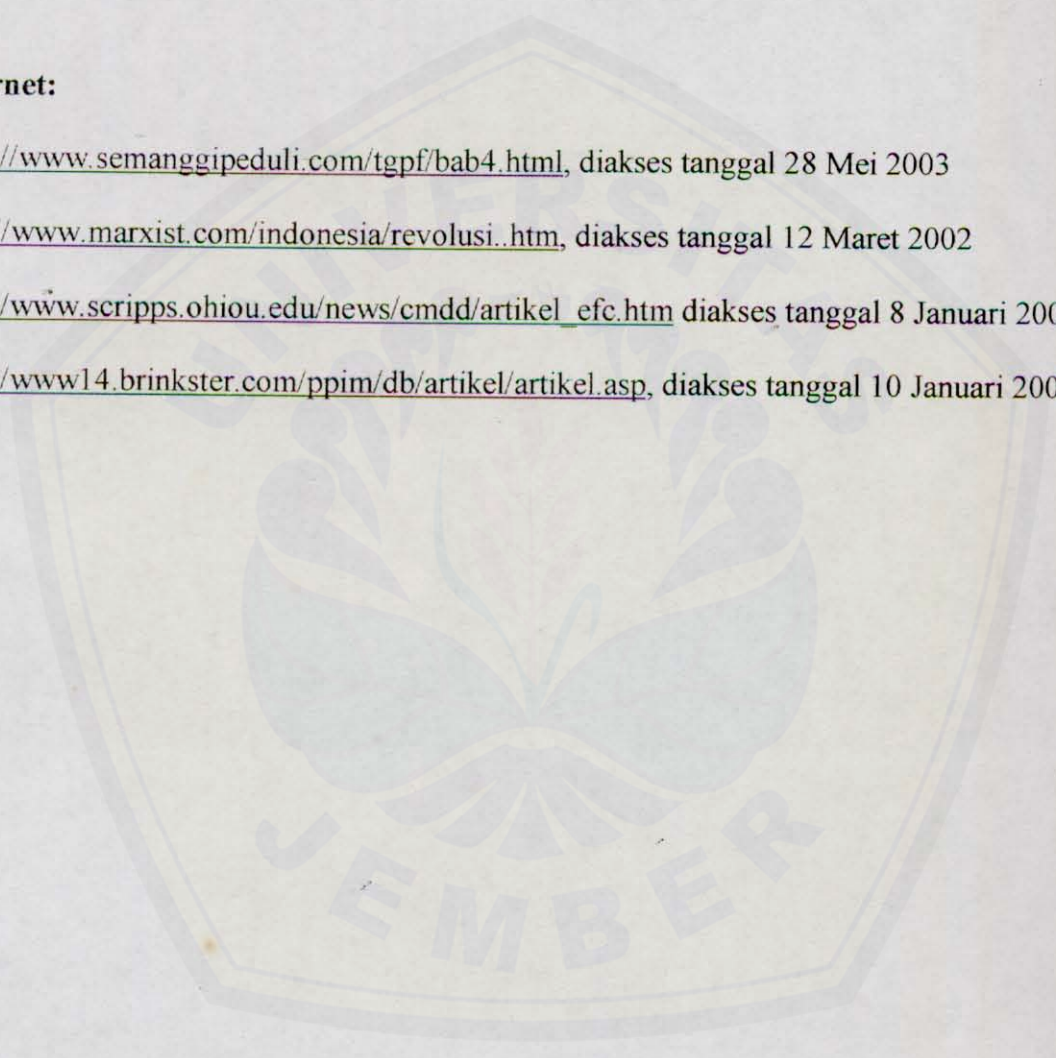
Internet:

[Http://www.semanggipedulil.com/tgpf/bab4.html](http://www.semanggipedulil.com/tgpf/bab4.html), diakses tanggal 28 Mei 2003

<http://www.marxist.com/indonesia/revolusi..htm>, diakses tanggal 12 Maret 2002

http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_efc.htm diakses tanggal 8 Januari 2003

<http://www14.brinkster.com/ppim/db/artikel/artikel.asp>, diakses tanggal 10 Januari 2003



Jumlah Tionghoa di 11 Propinsi Tahun 2000

Propinsi	Tionghoa	Total Penduduk	Persen
Jawa Tengah	165.531	30.917.006	0,54
Jawa Timur	190.968	34.756.400	0,55
Yogyakarta	9.942	3.119.397	0,32
Jawa Barat	163.255	35.669.397	0,46
Banten	90.053	35.668.374	01,11
Jakarta	460.002	8.079.938	5,553
Bangka-Belitung	103.736	8.324.707	11,54
Sumatra Barat	15.029	898.889	0,35
Riau	176.853	424.1256	3,72
Bali	10.630	4.750.068	0,34
Kalimantan Barat	352.937	3.732.419	9,46
Total	1.738.936	137.633.822	-

Keterangan: Seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2000 berjumlah 201.241.999 juta orang, maka kalau di 19 propinsi itu tidak dimasukkan kedalamnya, maka orang Tionghoa hanya berjumlah 0,86% dari total jumlah tersebut.

12 Besar Konglomerat Indonesia Versi PDBI (miliar rupiah)

2002	Konglomerat	Sales	2000 Aset	Unit Usaha	Sales	Rank	1996 Aset	Rank	Unit Usaha
1	Gudang Garam	11.784,2	8.945,5	50	6.625,0	4	4.425,0	18	47
2	Djarum	9.000,0	7.500,0	60	3.700,0	9	2.860,0	33	44
3	Sampoerna	7.521,5	6.393,6	34	2.600,0	16	3.000,0	32	29
4	Kalbe	4.771,8	4.025,3	375	1.367,5	30	1.900,0	42	82
5	Panin	4.449,9	7.728,0	44	2.350,0	19	5.586,5	13	46
6	Rodamas	4.305,5	5.772,5	57	2.550,0	17	3.250,0	27	36
7	Lippo	4.150,6	9.000,0	263	4.700,0	5	14.356,0	6	240
8	Central Pertiwi	3.050,3	2.5445,3	55	1.808,9	27	1.399,0	58	43
9	Bhakti	2.146,5	2.693,6	26	-	-	-	-	-

10	Ramayana	1.861,1	1.381,5	6	865,6	52	826,1	93	6
11	Tempo	1.523,5	1.570,8	83	1.230,0	33	1.264,2	60	67
12	Wicaksana	1.371,0	619,0	19	894,6	51	558,5	113	14
	Total	55.936,8	58.175,1	824,0	28.711,6		39.425,2		654,0

Sumber : Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) diolah dari berbagai sumber. Dikutip dari SWA, 18 April – 1 Mei 2002, hal.3

Bidang Sosial dan Budaya

- Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966 tentang Peraturan Ganti Nama bagi WNI yang Memakai Nama Cina.
- Instruksi Presidium Kabinet No. 49/U/IN/8/1967 tentang Pendayagunaan Mass Media Berbahasa Cina.
- Keppres No. 123/1968 tentang Memperpanjang Masa Berlakunya Peraturan Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia yang Memakai Nama Cina Sebagai Termaktub dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/Kep/12/1966.
- Instruksi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 0050/67/04 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/1966 tentang Prosedur Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia yang memakai Nama Cina Berdiam di Luar Negeri.
- Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 285/KP/XII/78 tentang Larangan Mengimpor, Memperdagangkan dan Mengedarkan Segala Jenis Barang Cetakan dalam huruf, aksara dan Bahasa Cina.

Bidang Pendidikan

- Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Inspektoral Jenderal No. SE 003/B/1978 tentang Masalah Gedung-gedung Bekas Sekolah Asing Cina.
- UU No. 48/prp/1960.L 1960-55 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing.

- Surat Menteri Agama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. A/058/1978 tentang Pelaksanaan Pelajaran Agama di Sekolah-sekolah.
- Suta Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. B-37/TP-PAPP A/II/78 tentang Inventarisasi Gedung-gedung Bekas Sekolah Asing/Cina.
- Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut WNI Keturunan Asing.

Bidang Agama

- Instruksi Menteri Agama No. 4/1978 tentang Kebijakanaksanaan Mengenai Aliran Kepercayaan.
- Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-089.J.S/9/1978 tentang Larangan Pengedaran/Penggunaan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Yayasan Pusat Strati Drama Yogyakarta.
- Surat Menteri Agama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. A/058/1978 tentang Pelaksanaan Pelajaran Agama di Sekolah-sekolah.
- Surat Menteri Agama No. B/594/78 tentang Masalah Menyangkut Aliran Kepercayaan.
- Instruksi Menteri Agama No. 14 Tahun 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan.

Bidang Kedudukan dan Kewarganegaraan

- jo 1919-81 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa.

- Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. JB 3/11/3 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan RI.
- Surat Menteri Kehakiman Kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonèsia No. DTA/60/24 Tahun 1968 tentang Bukti Kewarganegaraan RI.
- Staatsblaad 1922-75 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Orang-orang Indonesia Kristen.
- Departemen Kehakiman No. DTC/9 tentang Penjelasan Soal-soal Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Surat Edaran Menteri Kehakiman No. D.T.A./152/7 tentang Beberapa Hal Kewarganegaraan.

Bidang Ekonomi

- Peraturan Presiden No. 10/1959 tentang Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang bersifat Asing di Luar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan.
- Insturksi Presiden RI No. 10 Tahun 1968 tentang Pengawasan terhadap Kegiatan Warga Negara Asing yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. SE.6/37/UPK tentang Kredit Investasi untuk Golongan Pengusaha Kecil/Kredit Investasi Kecil.

Bidang Politik

- Keputusan Kepala BAKIN No. Kpts-C32 Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi, Prosedur dan Tata Cara Kerja Badan Koordinasi Masalah Cina.
- Resolusi MPRS RI No. III/Res/MPRS/1966 tentang Pembinaan Kesatuan Bangsa.

- PP No. 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan UU Kewarganegaraan RI.
- Inpres RI No. 2 Tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- SK Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri No. M.01-UM.09.03.80 No. 42 Tahun 1980.
- 1920-751 jo 1927-564 tentang Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia yang Tidak Termasuk dalam Kawula-kawula Daerah Swapraja di Jawa dan Madura.
- Staatsblad 1949 No. 25 Mengenai Reglemen tentang Catatan Sipil untuk Golongan Eropa.
- Surat Menteri Kahakiman Republik Indonesia kepada Kepala Pengadilan Negeri Pangkal Pinang DTB/14/21 Tahun 1972 tentang Status Kewarganegaraan RI bagi Orang-orang Cina (Tionghoa) yang Mengikuti Pemilihan Umum dan Pengeluaran Bukti Kewarganegaraannya.
- Undang-undang No. 3/1946 tanggal 10 April 1946 tentang Kewarganegaraan RI.
- Keputusan Presiden No. 2240 tahun 1967 tentang Kebijaksanaan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing.
- Keputusan Presiden No. 57/POL/KEP/10/1966 tentang Kebijaksanaan dan Masalah Kepulangan Orang-orang Warga Negara RRI dan Stateless.
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. JB 3/4/12 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan RI.

- Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing.
- Surat Menteri Kehakiman No. DTB/14/21 tentang Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Orang-orang Cina yang Mengikuti Pemilihan Umum dan Pengeluaran Buku Kewarganegaraan-nya.
- Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/1967 tentang Kebijakan-sanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.
- Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang Masalah Cina.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing yang Berada di Indonesia.
- Undang-undang No. 9/Drt/1955 tentang Kependudukan Orang Asing.
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing.
- Keputusan Presidium Kabinet No. 57/POL/KEP/10/1966 tentang Kebijakan dalam Masalah Kepulangan Orang-orang Warga Negara RRC dan Stateless.
- Surat Edaran Presidium Kabinet Republik Indonesia No. SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang Masalah Tionghoa.
- Keputusan Kepada Badan Koordinasi Intelejen Negara No. Kpts-031 Tahun 1973 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Masalah Cina.
- Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri No. Btux8/3/8-78 tentang Tanah/Bangunan Milik Badan Hukum, Perkum-pulan atau Perseorangan Belanda dan Cina.
- Undang-undang No. 9/Drt/1953 tentang Pengawasan Orang Asing.

BAB IV TEMUAN

4.1. Pola Umum Kerusuhan

Kerusuhan mempunyai pola umum yang dimulai dengan berkumpulnya massa pasif yang terdiri dari massa lokal dan massa pendatang (tak dikenal), kemudian muncul sekelompok provokator yang memancing massa dengan berbagai modus tindakan seperti membakar ban atau memancing perkelahian, meneriakkan yel-yel yang memanas situasi, merusak rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Setelah itu, provokator mendorong massa untuk mulai melakukan pengrusakan barang dan bangunan, disusul dengan tindakan menjarah barang, dan di beberapa tempat diakhiri dengan membakar gedung atau barang-barang lain. Di beberapa lokasi ditemukan juga variasi, di mana kelompok provokator secara langsung melakukan perusakan, baru kemudian mengajak massa untuk ikut merusak lebih lanjut.

Para pelaku kerusuhan 13-15 Mei 1998 terdiri dari dua golongan yakni, pertama, masa pasif (massa pendatang) yang karena diprovokasi berubah menjadi massa aktif, dan kedua, provokator. Provokator umumnya bukan dari wilayah setempat, secara fisik tampak terlatih, sebagian memakai seragam sekolah seadanya (tidak lengkap), tidak ikut menjarah, dan segera meninggalkan lokasi setelah gedung atau barang terbakar. Para provokator ini juga yang membawa dan menyiapkan sejumlah barang untuk keperluan merusak dan membakar, seperti jenis logam pendongkel, bahan bakar cair, kendaraan, bom molotov, dan sebagainya.

Dari sudut urutan peristiwa, TGPF menemukan bahwa titik picu paling awal kerusuhan di Jakarta terletak di wilayah Jakarta Barat, tepatnya wilayah seputar Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei 1998. Sementara pada tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan meluas dengan awalan titik waktu hampir bersamaan, yakni rentang antara pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB. Dengan demikian untuk kasus Jakarta, jika semata-mata dilihat dari urutan waktu, ada semacam aksi serentak. TGPF mendapatkan, bahwa faktor pemicu (triggering factor) terutama untuk kasus Jakarta ialah tertembak matinya mahasiswa Trisakti pada sore hari tanggal 12 Mei 1998.

Dalam derajat yang lebih rendah, tertembaknya mahasiswa Trisakti tersebut juga menjadi faktor pemicu kerusuhan di lima daerah yang dipilih TGPF, terkecuali kerusuhan Medan dan sekitarnya yang telah terjadi sebelumnya. Sasaran kerusuhan adalah pertokoan, fasilitas umum (pompa bensin, tanda-tanda lalu lintas dan lain-lain), kantor pemerintah (termasuk kantor polisi) yang menimbulkan kerusakan berat termasuk pembakaran gedung, rumah dan toko, serta kendaraan bermotor umum dan pribadi. Sasaran kerusuhan kebanyakan etnis Cina.

4.2. Pelaku

Para pelaku kerusuhan dapat dibagi atas tiga kelompok sebagai berikut:

4.2.1. Kelompok Provokator

Kelompok inilah yang menggerakkan massa, dengan memancing keributan, memberikan tanda-tanda tertentu pada sasaran, melakukan pengrusakan awal, pembakaran, mendorong penjarahan. Kelompok ini datang dari luar tidak



berasal dari penduduk setempat, dalam kelompok kecil (lebih kurang belasan orang), terlatih (yang mempunyai kemampuan terbiasa menggunakan alat kekerasan), bergerak dengan mobilitas tinggi, menggunakan sarana transport (sepeda motor, mobil/Jeep) dan sarana komunikasi (HT/HP). Kelompok ini juga menyiapkan alat-alat perusak seperti batu, bom molotov, cairan pembakar, linggis dan lain-lain. Pada umumnya kelompok ini sulit dikenal, walaupun di beberapa kasus dilakukan oleh kelompok dari organisasi pemuda (contoh di Medan ditemukan keterlibatan langsung **Pemuda Pancasila**). Ditemukan fakta keterlibatan **anggota aparat keamanan**, seperti di Jakarta, Medan, dan Solo.

4.2.2. Massa Aktif

Massa dalam jumlah puluhan hingga ratusan, yang mulanya adalah massa pasif pendatang, yang sudah terprovokasi sehingga menjadi agresif, melakukan perusakan lebih luas termasuk pembakaran. Massa ini juga melakukan penjarahan pada toko-toko dan rumah. Mereka bergerak secara terorganisir.

4.2.3. Massa Pasif

Pada awalnya massa pasif lokal berkumpul untuk menonton dan ingin tahu apa yang akan terjadi. Sebagian dari mereka terlibat ikut-ikutan merusak dan menjarah setelah dimulainya kerusuhan, tetapi tidak sedikit pula yang hanya menonton sampai akhir kerusuhan. Sebagian dari mereka menjadi korban kebakaran.

4.3. Korban dan Kerugian

4.3.1 Kategori

Tentang korban, selama ini dirasakan adanya kecenderungan dari pemerintah, masyarakat termasuk mass media memusatkan perhatian pada korban akibat kekerasan seksual semata-mata. Fakta menunjukkan bahwa yang disebut korban dalam kerusuhan Mei 1998 adalah orang-orang yang telah menderita secara fisik dan psikis karena hal-hal berikut, yaitu: kerugian fisik/material (rumah atau tempat usaha dirusak atau dibakar dan hartanya dijarah), meninggal dunia saat terjadinya kerusuhan karena berbagai sebab (terbakar, tertembak, teraniaya, dan lain-lain), kehilangan pekerjaan, penganiayaan, penculikan dan menjadi sasaran tindak kekerasan seksual.

Dengan demikian, korban dalam kerusuhan Mei lalu dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Kerugian Material:

Adalah kerugian bangunan, seperti toko, swalayan, atau rumah yang dirusak, termasuk harta benda berupa mobil, sepeda motor, barang-barang dagangan dan barang-barang lainnya yang dijarah dan/atau

dibakar massa. Temuan tim menunjukkan bahwa korban material ini bersifat lintas kelas sosial, tidak hanya menimpa etnis Cina, tetapi juga warga lainnya. Namun yang paling banyak menderita kerugian material adalah dari etnis Cina.

2. **Korban kehilangan pekerjaan:**

Adalah orang-orang yang akibat terjadinya kerusuhan, karena gedung atau tempat kerjanya dirusak, dijarah dan dibakar, membuat mereka kehilangan pekerjaan atau sumber kehidupan. Yang paling banyak kehilangan pekerjaan adalah anggota masyarakat biasa.

3. **Korban meninggal dunia dan luka-luka:**

Adalah orang-orang yang meninggal dunia dan luka-luka saat terjadinya kerusuhan. Mereka adalah korban yang terjebak dalam gedung yang terbakar, korban penganiayaan, korban tembak dan kekerasan lainnya.

4. **Korban Penculikan:**

Adalah mereka yang hilang/diculik pada saat kerusuhan yang dilaporkan ke YLBHI/Kontras dan hingga kini belum diketemukan, mereka adalah:

4.1. Yadin Muhidin (23 tahun) hilang di daerah Senen.

4.2. Abdun Nasir (33 tahun) hilang di daerah Lippo Karawaci;

4.3. Hendra Hambali (19 tahun), hilang di daerah Glodok Plaza;

4.4. Ucok Siahaan (22 tahun), hilang tidak diketahui di mana;

4.3.2. **Jumlah Korban dan Kerugian**

Sulit ditemukan angka pasti jumlah korban dan kerugian dalam kerusuhan. Untuk Jakarta, TGPF menemukan variasi jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka sebagai berikut:

(1) **data Tim Relewan** 1190 orang akibat ter/dibakar, 27 orang akibat senjata/dan lainnya, 91 luka-luka;

(2) **data Polda** 451 orang meninggal, korban luka-luka tidak tercatat;

(3) **data Kodam** 463 orang meninggal termasuk aparat keamanan, 69 orang luka-luka;

(4) **data Pemda DKI** meninggal dunia 288 , dan luka-luka 101 .

Untuk kota-kota lain di luar Jakarta variasi angkanya adalah sebagai berikut:

(1) **data Polri** 30 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar;

(2) **data Tim Relawan** 33 meninggal dunia, dan 74 luka-luka.

Opini yang selama ini terbentuk adalah bahwa mereka yang meninggal akibat kesalahannya sendiri, padahal ditemukan banyak orang meninggal bukan karena kesalahannya sendiri. Perbedaan jumlah korban jiwa antara yang ditemukan tim dengan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah terjadi karena pada kenyataannya begitu banyak korban yang telah dievakuasi sendiri oleh masyarakat, sebelum ada evakuasi resmi dari pemerintah. Korban-korban ini tidak tercatat dalam laporan resmi pemerintah.

4.4. Kekerasan Seksual

4.4.1. Kategori Korban

Dengan mengacu Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Sementara bila dipakai rujukan dari hukum positif Indonesia maka semua peristiwa kekerasan seksual tak dapat dijelaskan secara memadai dan adil. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dalam kerusuhan Mei 1998 lalu, dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu: perkosaan, perkosaan dengan penganiayaan, penyerangan seksual/penganiayaan dan pelecehan seksual.

4.4.2. Jumlah Korban

Dari hasil verifikasi dan uji silang terhadap data yang ada, menjadi nyata bahwa tidak mudah memperoleh data yang akurat untuk menghitung jumlah korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan. TGPF menemukan adanya tindak kekerasan seksual di Jakarta dan sekitarnya, Medan dan Surabaya.

Dari jumlah korban kekerasan seksual yang dilaporkan yang rinciannya adalah:

1. **Yang didengar langsung:** 3 orang korban
2. **Yang diperiksa dokter secara medis:** 9 orang korban;
3. **Yang diperoleh keterangan dari orang tua korban:** 3 orang korban;
4. **Yang diperoleh melalui saksi (perawat, psikiater, psikolog):** 10 orang korban;

5. Yang diperoleh melalui kesaksian rokhaniawan/pendamping (konselor): 27 orang korban;

1. **Korban perkosaan dengan penganiayaan:** 14 orang korban:
 - a. Yang diperoleh dari keterangan dokter: 3 orang korban;
 - b. Yang diperoleh dari keterangan saksi mata (keluarga): 10 orang korban;
 - c. Yang diperoleh dari keterangan konselor: 1 orang korban;
2. **Korban penyerangan/penganiayaan seksual:** 10 orang korban:
 - a. Yang diperoleh dari keterangan korban: 3 orang korban;
 - b. Yang diperoleh dari keterangan rohaniawan: 3 orang korban;
 - c. Yang diperoleh dari keterangan saksi (keluarga): 3 orang korban;
 - d. Yang diperoleh dari keterangan dokter: 1 orang korban;
3. **Korban pelecehan seksual:** 9 orang korban:
 - a. Yang diperoleh dari keterangan korban: 1 orang korban;
 - b. Yang diperoleh dari keterangan saksi: 8 orang korban (dari Jakarta dan Surabaya)

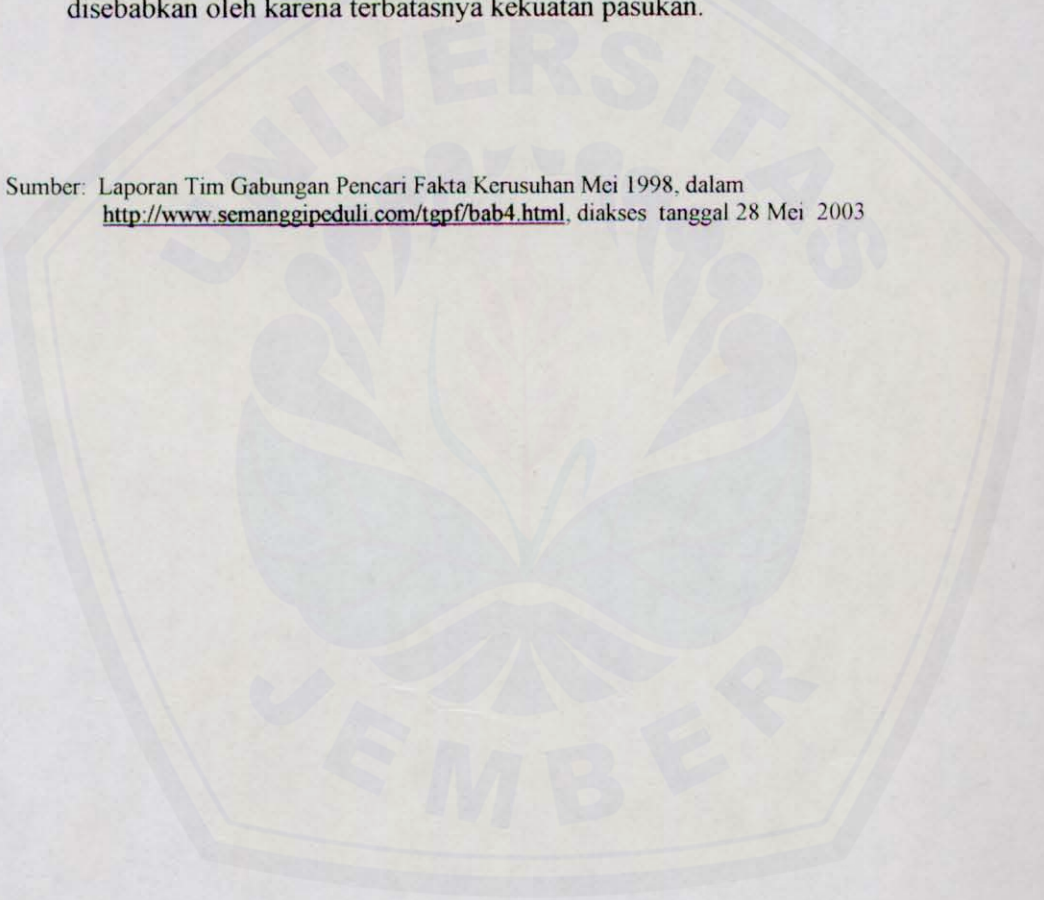
Selain korban-korban kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei, TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah kerusuhan Mei. Kasus-kasus kekerasan seksual ini ada kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan. Dalam kunjungan ke daerah Medan TGPF telah mendapatkan laporan tentang ratusan korban pelecehan seksual yang terjadi pada kerusuhan tanggal 4-8 Mei 1998 di antara mana 5 (lima) telah melapor. Setelah kerusuhan Mei, 2 (dua) kasus terjadi di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1998 dan 2 (dua) terjadi di Solo pada tanggal 8 Juli 1998.

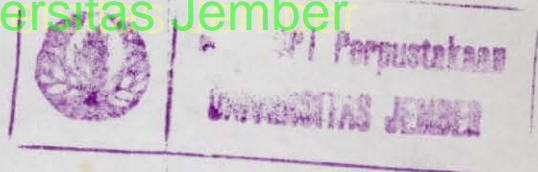
Kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 terjadi di dalam rumah, di jalan dan di tempat usaha. Mayoritas kekerasan seksual terjadi di dalam rumah/bangunan. TGPF juga menemukan bahwa sebagian besar kasus perkosaan adalah *gang rape*, di mana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama dan di tempat yang sama. Kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain. Meskipun korban kekerasan seksual tidak semuanya berasal dari etnis Cina, namun sebagian besar kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 lalu diderita oleh perempuan dari etnis Cina. Korban kekerasan seksual ini pun bersifat lintas kelas sosial.

4.5. Aspek Pertanggungjawaban Keamanan

Dari hasil verifikasi saksi dan korban, testimoni para pejabat ABRI dan mantan pejabat terkait, dari aspek keamanan TGPF menemukan fakta bahwa koordinasi antara satuan keamanan kurang memadai, adanya keterlambatan antisipasi, adanya aparat keamanan di berbagai tempat tertentu membiarkan kerusuhan terjadi, ditemukan adanya di beberapa wilayah *clash* (bentrokan) antarpasukan dan adanya kesimpangsiuran penerapan perintah dari masing-masing satuan pelaksana. Di beberapa tempat didapatkan bukti bahwa jasa-jasa keamanan dikomersilkan. Begitu pula TGPF menemukan adanya kesenjangan persepsi antara masyarakat dan aparat keamanan. Masyarakat beranggapan bahwa di beberapa lokasi telah terjadi vakum kehadiran aparat keamanan, atau bila ada tidak berbuat apa-apa untuk mencegah atau meluasnya kerusuhan. Sebaliknya, para pejabat keamanan berkeyakinan tidak terjadi vakum kehadiran aparat keamanan, meskipun disadari kenyataan menunjukkan bahwa untuk lokasi tertentu masih tetap terjadi kerusuhan (di luar prioritas pengamanan), hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya kekuatan pasukan.

Sumber: Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998, dalam <http://www.semangpeduli.com/tgpf/bab4.html>, diakses tanggal 28 Mei 2003





CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

NAMA : EVI KRISTANTI S.

NPM : 98-1137

Telah melaksanakan riset / survey pada
Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang :

FAKTOR PENYEBAB KERUSUHAN ANTI ETNIS CINA

BULAN MEI 1998

Untuk keperluan penyusunan Skripsi / Laporan Penelitian.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 8 Mei 2003



Maria Margrith Tirtasari
Pustakawan